



# Swantara

Majalah Triwulan Lemhannas RI No. 25 Tahun VII / Juni 2018



1963 Lemhannas RI 2018

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIC OF INDONESIA  
NATIONAL RESILIENCE INSTITUTE  
REPUBLIC OF INDONESIA

## **Orasi Ilmiah “ Geopolitik, Ketahanan Nasional, dan Kemerdekaan Sejati” Getankas**





Seluruh Tim Redaksi **Swantara**

mengucapkan:

*Minal Aidzin  
Walfaidzin*

*Mohon Maaf  
Lahir dan Bathin*





**PELINDUNG** AGUS WIDJOJO  
**PEMBINA** BAGUS PURUHITO  
**PENGARAH** MOCHAMAD IRIAWAN  
**PENANGGUNG JAWAB/PEMIMPIN REDAKSI** MINDARTO  
**REDAKTUR** WAHYU WIDJI PAMUNGKAS  
**PENYUNTING/ EDITOR**  
EDDY TARJONO, LINDA PURNAMASARI  
**DESAIN GRAFIS**  
BAMBANG IMAN ARYANTO, ANDRIANSYAH  
**KOORDINATOR FOTOGRAFER** M. ISDAR  
**FOTOGRAFER** SURYADI, SUYONO  
**SEKRETARIAT** ADLANSYAH M, HERU SEPTOWIDODO,  
GATOT, MARDIANA PRIHATINI, YUSNADI, DASWATI,  
JEMARI, YATIK WULANDARI  
**PENULIS ARTIKEL**  
ENDAH HELIANA, CAHYAQADRI HILDAMONA,  
MAGISTA DIAN, NI MADE VIRA, AISYAH SALSABILA  
  
**ALAMAT REDAKSI** BIRO HUMAS LEMHANNAS RI  
JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 10 JAKARTA 10110  
**TELP.** (021) 3832108, 3832109  
**FAX** (021)-3451926  
**EMAIL** : humas@lemhannas.go.id  
**WEBSITE** : www.lemhannas.go.id

ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN

SWANTARA MENERIMA ARTIKEL DAN OPINI DARI LUAR  
LEMHANNAS RI DAN AKAN DIMUAT APABILA  
SESUAI DENGAN KEBIJAKAN REDAKSI

# Catatan Redaksi

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua  
Om Swasti Astu

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya Majalah Swantara Edisi ke-25 bulan Juni 2018, kembali hadir di tengah-tengah para pembaca.

Pada edisi ke-25 ini, redaksi berusaha terus meningkatkan kualitas, baik konten maupun layout agar lebih segar dan mampu memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan kelembagaan dan memberikan pesan yang sarat makna kepada pembaca. Selain kegiatan kelembagaan, redaksi juga mengangkat kolom inspirasi dari peserta PPRA LVIII Arundati Shinta mengenai *Plogging* dan Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-Hari.

Redaksi menyadari jika penyusunan penerbitan Majalah Swantara edisi kali ini jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, kami tetap mengharapkan kritik dan masukan dari para pembaca demi eksistensi dan kemajuan karya jurnalistik yang akan kami sajikan pada edisi mendatang. Tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berperan dalam membantu terbitnya Majalah Swantara Edisi 25 kali ini.

Semoga, Majalah Swantara tetap berkesan di hati para pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Salam Sejahtera  
Om Shanti Shanti Shanti Om

## RALAT

Pada Majalah Swantara edisi ke-24, bulan Maret 2018 dalam rubrik Wawancara berjudul "Ciptakan Intellectual Atmosphere Lewat 'Forum Berbagi Ilmu'", di halaman 52, terdapat kesalahan penulisan nama narasumber yang sebelumnya tertulis Prof. Dr. Njaju Jenny Malik Toni Hardjanto, seharusnya ditulis Prof. Dr. Njaju Jenny Malik Tomi Hardjatno. Redaksi menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan tersebut. Dengan demikian kesalahan telah diperbaiki.



## Salam Ketahanan Nasional

Pada edisi ke-25 Juni 2018 ini, Majalah Swantara menyoroti kegiatan yang dilakukan Lemhannas RI pada triwulan kedua tahun 2018. Pada 20 Mei 2018 lalu, Lemhannas RI genap memasuki usia ke-53 tahun. Beberapa kegiatan terkait dengan perayaan peringatan ulang tahun Lemhannas RI yang menjadi *highlight* adalah Orasi Ilmiah “Geopolitik, Ketahanan Nasional, dan Kemerdekaan Sejati ‘Getankas’” yang dibawakan oleh tokoh muda Kris Wijoyo Soepandji, S.H., M.P.P., kegiatan lomba dan pertandingan, upacara di TMP Kalibata, dan upacara dalam rangka HUT ke-53 di Lemhannas RI.

Selain itu, sebagai respon terhadap dinamika politik Indonesia dan tahun politik di 2019, Lemhannas RI mengundang Budayawan Romo Franz Magnis Suseno untuk mengisi kuliah pada peserta PPRA LVII mengenai Pancasila sebagai Ideologi Bangsa serta Dewan Analisis Strategis Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn) Muhammad Munir yang mengisi kuliah mengenai Ancaman Kritis Nir Militer Hingga Tahun 2025.

Dalam mewujudkan peran serta fungsinya, Lemhannas RI secara berkelanjutan menyusun berbagai program kegiatan antara lain seperti menyiapkan dan memantapkan kader-kader pemimpin nasional, menghasilkan rekomendasi kajian-kajian isu strategis baik nasional maupun internasional, serta memantapkan nilai-nilai kebangsaan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, kami berharap Majalah Swantara edisi ke-25 yang diterbitkan pada Juni 2018 ini dapat menjadi *insight* bagi para pembaca dalam merespon kondisi perkembangan politik nasional.

Gubernur Lemhannas RI

## Daftar Isi



6 Program Pendidikan Reguler Lemhannas RI Turut Membentuk Watak Kepemimpinan Strategis



8 Purnomo Yusgiantoro, Titipkan Masa Depan Kedaulatan NKRI di Tangan Peserta PPRA LVII



20 TB Silalahi, Cerita Kepemimpinan Visioner Tokoh Indonesia di Masa Lampau



22 Langkah Indonesia Menghadapi Kebijakan Amerika Serikat dan China



34 Lemhannas RI Selenggarakan RTD Mengenai Antisipasi Dampak Urbanisasi



36 Romo Magnis, Sisi Lain Pancasila sebagai Ideologi



46 Kepala Biro Humas Setama Lemhannas RI Kunjungi MNC Group, LPP RRI, dan LPP TVRI



48 Lemhannas RI Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Tiga Lembaga Sekaligus



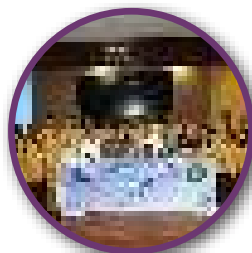
58 Halalbihalal Jadi Momen Perkuat Tali Silaturahmi Pegawai Lemhannas RI



10 Wujudkan Birokrasi yang Berkualitas Melalui Peningkatan Kompetensi SDM



12 Indonesia Junjung Tinggi Perdamaian Dunia



14 Kunjungan Mahasiswa Universitas Mulawarman ke Lemhannas RI



16 Lemhannas RI Angkat Pelibatan TNI dalam RUU Anti Teror



18 Prof. Muladi: Pemimpin dengan Pancasila Menjadi Lebih Baik



24 Agus Widjojo Titipkan Tanggung Jawab Settama Lemhannas RI pada Komjen Pol Iriawan



26 Upacara Peringatan HUT ke 53 Lemhannas RI



28 Orasi Ilmiah dalam rangka HUT ke-53 Lemhannas RI "Getankas"



30 Foto-foto Kegiatan Olahraga HUT Lemhannas RI



32 Kegiatan HUT Lemhannas RI



38 Penuhi Undangan CIISS ke China, Gubernur Sempatkan Sambangi Perusahaan Strategis Pertahanan



40 Mensesneg Beri Ceramah Mengenai Sistem Manajemen Nasional dan Revolusi Industri 4.0 Kepada Peserta PPRA LVIII



42 Menristekdikti : Tantangan Indonesia dalam Daya Saing Global



44 Dewan Analis Strategis BIN Letjen TNI (Purn) Muhammad Munir Beri Kuliah Mengenai Ancaman Kritis Nir Militer Hingga 2025



50 Kepala BNPB: Perubahan Iklim Ancam Ketahanan Nasional Indonesia



52 K. H. Muhammad Cholil Nafis, Lc. M.A., Ph.D.: Peringatan Nuzulul Quran Lemhannas RI



54 US National War College Diskusikan Isu Geopolitik, Ekonomi, dan Keamanan Indonesia di Lemhannas RI



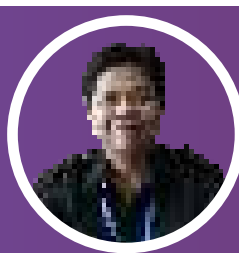
56 Kenali Karakter Pemimpin Lewat Permainan Outbound Rangkaian Kegiatan PPRA LVIII



60 Peter Senge Hadir Berikan Materi Mengenai Collaborative Working Pada Peserta Making Indonesia 4.0

## INSPIRASI

64 *Plogging* dan Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-Hari





## **Program Pendidikan Reguler Lemhannas RI Turut Membentuk Watak Kepemimpinan Strategis**

Para peserta PPRA LVIII sebagai kader pimpinan tingkat nasional dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu, dituntut untuk memiliki etika, moral dan kejujuran. Hal tersebut sebagai prasyarat utama dalam membentuk karakter pemimpin yang memiliki pola pikir, sikap dan tindakan yang berdasarkan pada pandangan geopolitik dan geostrategik bangsa Indonesia yang holistik, integral, dan komprehensif. Keberhasilan para peserta dalam memahami pendidikan di Lemhannas RI salah satunya ditentukan dari komitmen dalam menjalankan pendidikan itu sendiri. Hal tersebut sejalan dengan yang diamanatkan Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo pada saat pembukaan PPRA 58 di Ruang Dwiwarna Purwa, Gd. Pancagatra Lemhannas RI (26/3).



*“Kesadaran untuk mematuhi segala ketentuan yang akan membentuk karakter kepribadian yang menjadi sumbangan perseorangan peserta bagi proses revolusi mental secara nasional,”*

*Letjend TNI (Purn) Agus Widjojo.*

**M**enurut Agus Widjojo, revolusi mental dalam membentuk karakter kepemimpinan yang kuat tidaklah melalui pengajaran sifat-sifat mental yang baik, melainkan dengan kesadaran peserta untuk mematuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh lembaga dalam menyelenggarakan pendidikan. “Kesadaran untuk mematuhi segala ketentuan yang akan membentuk karakter kepribadian yang menjadi sumbangan perseorangan peserta bagi proses revolusi mental secara nasional,” ujar Agus Widjojo.

Hal mendasar yang harus dipahami oleh para peserta PPRA 58 yakni pada saat proses belajar sebagai pembentukan watak kepemimpinan yakni dimana para peserta akan mengalami eksperimen sebagai pemimpin, sekaligus pengikut dalam hubungan organisasi. Di samping itu peserta akan belajar cara menempatkan diri dalam organisasi, pengambilan keputusan, dan menempatkan diri ketika menghadapi keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak pribadi. “Semua pengalaman tersebut akan dibawa ke dalam dunia nyata, dan sebagai wujud implementasi revolusi mental,” ujarnya.

Gubernur menekankan bahwa predikat yang melekat pada Lemhannas RI sebagai lembaga yang mendidik pemimpin tingkat nasional, sebenarnya tidak berarti bahwa pendidikan disini membentuk pemimpin tingkat nasional, melainkan untuk mempertajam kapasitas dan efektifitas kepemimpinan para peserta pada tingkat strategis. “Sebenarnya para peserta sudah menjadi pemimpin tingkat nasional, pendidikan belum merupakan wilayah

untuk mencetak kinerja. Kinerja dihasilkan oleh peserta di lapangan setelah lulus dari Lemhannas,” ujarnya.

Selain itu Agus Widjojo juga berpesan kepada para peserta agar dalam menjalankan pendidikan di Lemhannas RI memiliki rencana perseorangan untuk dicapai, yakni mampu menganalisis dan membuat keputusan pada tingkat strategis sebagai seorang pemimpin. “Hasil yang dicapai para peserta harus lebih lengkap dalam memiliki pengetahuan dan kemampuan membuat analisis dan keputusan pada tingkat strategis sebagai seorang pemimpin selesai mengikuti pendidikan nantinya,” katanya.

Dengan tujuan tersebut, diharapkan proses pendidikan yang berjalan selama tujuh bulan bukanlah untuk bersaing dengan sesama peserta PPRA 58, melainkan menantang peserta untuk berlomba dengan diri sendiri. “Lemhannas RI tidak mengajarkan lomba kepandaian antar peserta, karena kepandaian bukan dicerminkan oleh nilai yang didapat di sekolah, melainkan ditentukan oleh kegunaannya ketika bertugas di lapangan,” katanya.

Diakhir amanat, Gubernur Lemhannas RI mengingatkan bahwa kepemimpinan strategis tidak lagi berpusat pada kompetisi, tetapi membutuhkan kemampuan untuk menyatukan perbedaan dalam bentuk bekerjasama. Para peserta dituntut untuk mampu beradaptasi dengan adanya perubahan karena kemajuan tidak mungkin dicapai tanpa perubahan. “Ego dan esteem-diri sudah cukup kita bangun dalam masa kompetisi di tingkat teknis dan individu, kini saatnya peserta untuk mentransformasikan mindset dan fokus pada pengembangan kerja untuk mencapai tujuan bersama,” jelas Agus Widjojo. [AS]



# *Purnomo Yusgiantoro,* *Titipkan Masa Depan Kedaulatan NKRI* *di Tangan Peserta PPRA LVII*



Sengketa kedaulatan yang terjadi di Laut China Selatan (LCS) antara Republik Rakyat China (RRC) versus lima negara, terutama negara-negara di ASEAN seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, serta Taiwan, bermula saat China melakukan klaim atas wilayah LCS, sehingga memancing negara-negara di kawasan tersebut ikut melakukan klaim serupa. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Pertahanan di era Presiden SBY, Prof. Purnomo Yusgiantoro saat memberikan ceramah di hadapan 100 peserta PPRA LVII Lemhannas RI, (11/4) di ruang NKRI, Gedung Astagatra Lemhannas RI, bahwa klaim mutlak oleh RRC atas LCS yang dikenal dengan *nine dash line* atau sembilan garis putus itu pertama kali dilakukan pada pertemuan Workshop on Managing Potential Conflict in South China Sea. "Pada tahun 1993 pertama kali muncul, China pada saat seminar tersebut menyebarkan peta baru dengan *nine dash line* itu, dan kemudian mulai timbul mengenai Laut Cina Selatan," ujarnya.

**P**enyebaran isu mengenai *nine dash line* hingga pada 7 Mei 2009 secara resmi mengajukan nota diplomatik RRC kepada Sekjen PBB di masanya. Purnomo menegaskan bahwa wilayah Indonesia yang berhadapan dengan Laut China Selatan menjadi rawan karena akan dijadikan tempat transit bagi negara-negara asing yang berkonflik atas LCS. "Kita tidak punya sengketa teritorial perbatasan dengan RRC, kita bersikap netral dan menjembatani secara damai bagi *claimant states* dalam klaim batas negara," ujar Purnomo. Pada 2009, China sudah pernah mendaftarkan Laut China Selatan sebagai wilayahnya ke PBB, tapi ditolak oleh Permanent Court of Arbitration di Den Haag, karena China tak bisa menjelaskan dasar hukum yang valid.

Namun yang menarik adalah sejak tahun 1995, China tidak pernah mengeluarkan statement resmi yang

menunjukkan bahwa wilayah mereka *overlap* (tumpang tindih) dengan Indonesia. "Dia (China) gak mau main-main dengan kita. Jadi sebenarnya China tidak ada masalah dengan kita," katanya.

Pengelolaan perbatasan negara kepulauan jauh lebih kompleks jika dibandingkan dengan *continental state* (*negara benua*), karena menyangkut masalah infrastruktur, transportasi, komunikasi, kontrol, dan proteksi. "NKRI adalah *Archipelagic State* (negara kepulauan) terbesar di dunia. Masalah-masalah ketahanan nasional, perlu perhatian khusus seperti dua sisi mata uang, terutama kesejahteraan dan keamanan. Masalah ini kompleks kalau di perbatasan, karena berdimensi dengan Astagatra dan itu diberikan di Lemhannas. Tanggung jawab kalian (peserta PPRA LVII) untuk memikirkan dan merumuskannya," ujarnya.





“

*“Harus ada transformasi cara pandang geopolitik, wawasan nusantara dan geostrategi Indonesia, yaitu ketahanan nasional. Laut harus dipandang sebagai pemersatu, pendekatannya melalui kesejahteraan dengan keamanan”*

*- Menteri Pertahanan di era Presiden SBY, Prof. Purnomo Yusgiantoro*

Menurut mantan Wakil Gubernur Lemhannas RI tahun 1998 ini, beberapa hal yang perlu menjadi atensi yakni dari politik bagaimana untuk mempertahankan hak kedaulatan penuh. Sedangkan dari segi ekonomi bagaimana bangsa ini mengolah sumber daya alam (SDA) dan pemberdayaan ekonomi dengan maksimal. Masalah tidak berhenti sampai disitu, dari aspek sosial dan budaya juga berdampak pada persinggungan nilai dan karakter bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Serta aspek pertahanan dan keamanan mengenai kedaulatan dan keutuhan NKRI, bahkan mencakup ketertiban di perbatasan yang meliputi harga diri dan martabat bangsa.

“Memang harus ada transformasi cara pandang geopolitik, wawasan nusantara dan geostrategi Indonesia, yaitu ketahanan nasional. Laut harus dipandang sebagai pemersatu, pendekatannya melalui kesejahteraan dengan keamanan. Karena kultur masyarakat masih berorientasi pada daratan. Selain itu, pengelolaan sumber di laut, Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinental belum maksimal,” tegasnya.

Pasca putusan Mahkamah Arbitrase (12 Juli 2016) yang memenangkan gugatan Filipina atas China di LCS berdampak positif bagi bangsa Indonesia. Putusan tersebut dianggap dapat menjadi sumber hukum internasional

atas klaim kawasan Natuna oleh China sebagai wilayah penangkapan ikan tradisional. Saat ini, pembangunan pertahanan di kawasan Natuna diperkuat dengan perluasan pangkalan militer, di antaranya pada matra darat dilakukan penebalan pos terdepan Pulau Sekatung dan pulau terluar lainnya. Pada matra laut menempatkan kapal selam dan armada kapal perang di setiap *choke point*. Sedangkan di matra udara dilakukan perluasan Lanud Natuna, Drone, dan pembangunan radar. “Kita berpedoman pada dokumen produk strategis yang berisi doktrin, postur, strategi, buku putih, penyelarasan MEF (pembangunan kekuatan pokok pertahanan/ minimum essential forces), harus ada penyesuaian dari waktu ke waktu. Kemudian MEF untuk setiap renstra, dan penjabaran MEF tiap matra (darat laut udara),” ujar lelaki yang juga Alumni PPRA XXV Lemhannas RI ini. [AS]



## Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Kemenpan RB: Wujudkan Birokrasi yang Berkualitas Melalui Peningkatan Kompetensi SDM

Kunci dari birokrasi pemerintahan yang berkualitas terletak pada Sumber Daya Manusianya (SDM) itu sendiri, apabila SDM-nya berkualitas maka birokrasinya akan berkualitas pula. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB) memandang perlu adanya peningkatan terhadap reformasi birokrasi sebagai bagian dari upaya pembangunan, karena tanpa dukungan birokrasi yang baik, akan berdampak pada pembangunan yang tidak akan berjalan dengan baik.

**H**al tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Kemenpan RB Drs. Teguh Wijinarko pada saat berbicara di hadapan para peserta PPRA LVII di Lemhannas RI (16/4). Menurutnya, birokrasi dapat dilihat dari sistem manajemen nasional, dimana terdapat empat bagian yang terbagi ke dalam *outer setting* (pengaturan luar) dan *inner setting* (pengaturan dalam). "Sistem manajemen nasional adalah aturan tata pemerintahan dalam bernegara, ada unsur kemasyarakatan, pemerintahan, politik nasional, dan administrasi negara," kata Teguh.

Tantangan lain dalam mewujudkan birokrasi yang berkualitas yakni negara kita akan menghadapi Revolusi Industri 4.0, oleh karena itu diperlukan talenta yang mampu

menghadapi perubahan tersebut. Kompetensi antar SDM lokal sangat dibutuhkan agar Indonesia tak hanya menjadi penonton dalam Revolusi Industri 4.0.

"Kita perlu talenta berbakat tertentu yang bisa menghadapi 4.0 mendatang, melalui pelatihan tertentu. Kita harus bersiap menghadapi, menyesuaikan elektabilitas kita terhadap perkembangan teknologi baru," ungkapnya. Lemhannas RI turut andil sebagai pelaksana harian dalam merealisasikan *roadmap* (peta jalan) yang digalangkan oleh Presiden Jokowi yakni Making Indonesia 4.0. "Lemhannas juga dilibatkan dalam melatih 1000 *technopreneurs* (pengusaha yang bergerak dalam bidang teknologi informasi) dalam proses pendidikan dan pelatihan yang dirancang secara nasional," kata Teguh.



Ia mengatakan bahwa Kemenpan RB berupaya mewujudkan salah satu dari sembilan Nawacita yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi yakni membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya dan seterusnya. "Salah satu aspek yang terkait dengan ini adalah menjalankan reformasi birokrasi. Di dalam roadmap reformasi birokrasi kita memiliki tiga tujuan utama yaitu kita ingin membuat birokrasi yang bersih dan akuntabel, kemudian menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta menghadirkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas," ujarnya.

Teguh memaparkan pula terkait delapan area perubahan yang menjadi sasaran reformasi birokrasi, yakni manajemen perubahan, penguatan organisasi, pengaturan perundang-undangan, kemudian melakukan penataan SDM, tata laksana, memperkuat pengawasan, akuntabilitas kinerja, serta kualitas pelayanan publik. Menurut ia diperlukan organisasi pemerintahan yang efektif dalam menjalankan fungsi pemerintahan, dan Kemenpan RB dalam waktu dekat telah melakukan penyederhanaan beberapa organisasi yang dianggap tidak efektif karena terjadi tumpang tindih antara tugas dan fungsi dengan kementerian/lembaga teknisnya. "Di samping itu, juga dilakukan efisiensi unit kerja di dalam K/L yang intinya adalah supaya tidak terjadi tumpang tindih satu tugas dengan tugas lainnya," katanya.

Fakta menunjukkan persentase tenaga kepegawaian pemerintah dengan tugas administratif mencapai 60 persen, dibandingkan tenaga kepegawaian untuk tugas-tugas teknisnya hanya sebesar 40 persen saja. "Oleh karena itu, ini menjadi kelemahan yang akan kita perbaiki secara perlahan lahan, meskipun beberapa tahun lalu dan tahun ini sudah ada moratorium, serta tahun depan akan kita

mulai di pemerintah daerah. Sekitar 200 ribu yang pensiun mungkin kita akan menerima kurang dari 200 ribu," ujarnya.

Permasalahan lain yang dianggap cukup sulit untuk dirubah yakni budaya kerja ASN karena berkaitan dengan mental model. Kemenpan RB sendiri membentuk sebuah kebijakan tentang revolusi mental yang dikenal dengan Indonesia Melayani. "Kita berfokus bagaimana membangun sistem manajemen SDM yang baik. Untuk meningkatkan wawasan ASN tidak cukup dengan membuat cita-cita tertentu, tetapi kita juga ingin membangun sistem itu menjadi lebih baik," kata Teguh. Dalam membangun manajemen SDM yang baik harus dimulai sejak masa rekrutmen, yakni penyaringan kepegawaian melalui sistem rekrutmen yang transparan, bersih dan bebas dari KKN. [AS]

*“Kita perlu talent-talent tertentu yang bisa menghadapi 4.0 mendatang, melalui pelatihan tertentu. Kita harus bersiap menghadapi, menyesuaikan elektabilitas kita terhadap perkembangan teknologi baru”*

*- Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Kemenpan RB  
Drs. Teguh Wijnarko*

# Indonesia

## Junjung Tinggi Perdamaian Dunia

Kuliah dari Menlu RI Y.M. Retno L.P. Marsudi kepada Peserta PPRA LVII

Lemhannas RI sebagai lembaga dengan fungsi utama menyelenggarakan pendidikan bagi kader-kader pimpinan tingkat nasional dan menghasilkan pemimpin yang multi disiplin, tentunya tak main-main dalam menggodok para pesertanya selama menempuh pendidikan. Salah satu metode belajar yang diterapkan di Lemhannas RI yakni ceramah dan diskusi dengan menghadirkan berbagai tokoh-tokoh nasional sebagai narasumber. Seperti pada (20/4) lalu dimana peserta PPRA LVII diberi kesempatan untuk mencuri ilmu dari Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Y.M. Retno L.P. Marsudi, yang berbagi pengalamannya pada saat melakukan berbagai upaya diplomasi Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Retno menyebutkan bahwa selama tahun 2017 saja sebanyak 10 ribu kasus hukum yang menyangkut Warga Negara Indonesia (WNI) berhasil dituntaskan oleh Kemlu. "Dalam satu tahun, kita dapat menyelesaikan 10 ribu dari 15.454 kasus, sisanya kasus berat yang tidak dapat diselesaikan secara cepat dalam waktu satu tahun," katanya.

**D**ari 10 ribu kasus, 40 di antaranya merupakan kasus dengan ancaman hukuman mati terhadap WNI, dan Kemlu berhasil membebaskan sebanyak 37, dan 3 kasus lagi sedang dalam proses pendampingan hukum. "Banyak sekali cerita kemanusiaan dalam melakukan pembelaan WNI yang terkena kasus hukum di negara lain, kita tidak membela tindakan kriminal, tetapi kita memastikan bahwa hak-hak hukum WNI tidak ada yang dikurangi," ujarnya. Retno menitipkan pesan kepada para peserta PPRA LVII, yakni perlu ada proses edukasi kepada masyarakat bahwa dimanapun Anda berada, hormatilah hukum yang berlaku di negara setempat, begitu pula sebaliknya. Sebagai contoh hukum yang berlaku di Arab Saudi, jika keluarga korban tidak memberikan maaf maka pelaku yang bersangkutan tidak bisa dibebaskan. Oleh karenanya,


pihak Kemlu semaksimal mungkin memberikan pendampingan hukum dan konsuler sekaligus menyediakan penerjemah bagi terdakwa hukuman mati.

Tak hanya itu, Indonesia juga pernah melakukan evakuasi secara besar-besaran di wilayah konflik di Yaman sekitar tahun 2015. Disampaikan pula oleh Retno bahwa baru sekitar awal tahun 2018 Kemlu berhasil mengevakuasi enam anak buah kapal WNI yang disandera kelompok bersenjata di Benghazi, Libya. "Pembebasan seperti ini bukan *exercise* yang mudah, karena ada sensitivitas antara Tripoli dan Benghazi. Komunikasi harus kita sampaikan secara perlahan-lahan, baik dengan ibu kota Libya, Tripoli maupun dengan wilayah Benghazi yang kebetulan posisi politiknya tidak menjadi satu," jelasnya.

Menyikapi masalah tersebut, maka para diplomat Indonesia diberikan satu pelatihan khusus terkait masalah evakuasi. Menurutnya sistem perlindungan WNI di luar negeri dari waktu ke waktu semakin membaik, dan hal tersebut berkat adanya perubahan mindset dari para diplomat Indonesia yang meletakkan keberpihakannya terhadap keselamatan dan keamanan WNI. "Sistem perlindungan WNI terus membaik, mindset diplomat kita berubah, dan sistem perlindungan kita terus lakukan inovasi," ujar Retno.

Kemlu melakukan terobosan inovasi teknologi sebagai upaya melindungi WNI yang hendak bepergian ke luar negeri, yakni dengan meluncurkan sebuah





***“Indonesia akan terus aktif memainkan peran di dunia internasional, baik untuk memperjuangkan kepentingan nasional kita, maupun untuk berkontribusi dalam memajukan kesejahteraan dan perdamaian dunia”***  
*Menlu RI - Retno Marsudi*

aplikasi *Safe Travel* (perjalanan yang aman), dimana para penggunanya bisa dengan mudah memperoleh berbagai informasi terkait masalah yang sedang terjadi di negara yang akan dikunjungi. “Apabila terjadi masalah di negara yang dikunjungi, pengguna akan mendapat informasi dari sistem yang kita bangun dan tahu kemana harus minta perlindungan. Aplikasi ini terbaru yang dimiliki untuk meningkatkan perlindungan WNI yang bepergian ke luar negeri,” jelas Retno.

Retno berbagi pengalamannya pada saat mengunjungi TKI yang bekerja di perkebunan kelapa sawit di negara lain, dan mendengarkan secara langsung keluhan apa yang kerap mereka hadapi pada saat bekerja di negeri orang. Menurutnya kendala sesungguhnya yang mereka temui justru bukanlah pada saat mereka bekerja di luar negeri, melainkan ketika mereka tiba di tanah air. “Kadang-kadang keluhannya tidak pada saat mereka bekerja, melainkan pada saat mereka tiba di Indonesia. Misal mereka megang duit *cash* selama kerja, sampai di airport Indonesia ada saja yang meminta handphone atau mengganggu mereka. Kita harus berubah, mental premanisme harus dipotong, mentalitas korupsi harus dibasmi sampai habis, keberpihakan kami menjadi prioritas kami,” tegasnya.

Sesuai dengan amanah konstitusi Bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat yakni “ikut melaksanakan ketertiban dunia”, oleh karena itu upaya diplomasi perdamaian dunia dan kemanusiaan terus digalakkan untuk menjaga Indonesia untuk terus berkontribusi di dalamnya. “Yang terakhir adalah kita berhasil menyetujui *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* (Konsensus ASEAN dakan Promosi dan Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran), dalam konteks ASEAN. Perjuangannya tidak mudah karena banyak negara ASEAN yang tidak tertarik dengan isu migrant workers, tetapi kita bersama dengan Filipina

berusaha berjuang dan akhirnya para pemimpin ASEAN sepakat,” ungkap Retno. Konflik Palestina dan Israel yang hingga saat ini masih mencuat, juga menjadi keprihatinan besar bagi bangsa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Retno dengan tegas mengatakan bahwa posisi Indonesia sangat konsisten dan menginginkan penyelesaian konflik secara damai dengan berdasarkan *two state solutions*. “Sebagai negara muslim terbesar di dunia, maka dampak isu Palestina akan sangat dirasakan di dalam negeri. Indonesia akan berdiri tegar untuk membela Palestina. Kita terus memberikan dukungan ekonomi terhadap Palestina, termasuk mendidik para diplomatnya yang ada di Indonesia. Kita juga memfasilitasi agar misi Palestina di Indonesia dapat beroperasi dengan baik,” ungkap Retno.

Tak hanya pada Palestina, Indonesia juga secara konsisten terus memberikan *concern*-nya terhadap kondisi kemanusiaan di Rakhine State dan para pengungsi di Cox Bazar Bangladesh. “Indonesia akan terus aktif memainkan peran di dunia internasional, baik untuk memperjuangkan kepentingan nasional kita, maupun untuk berkontribusi dalam memajukan kesejahteraan dan perdamaian dunia,” tambahnya.

Di akhir paparannya kepada para peserta PPRA LVII, Retno menegaskan bahwa Indonesia akan tetap memainkan politik bebas aktif yang memajukan penghormatan terhadap hukum internasional dan Piagam PBB, karena dirasakan sudah semakin banyak negara yang menerjang hak dan aturan internasional. “Kita ingin menjadi *champion* (pemenang) bagi gerakan moralitas internasional, kita akan berdiri tegak mengedepankan penghormatan hukum, nilai-nilai internasional termasuk di antaranya Piagam PBB, dengan tujuan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas dunia,” tutup Retno. [AS]

# Keberhasilan Negara Ditentukan oleh Pemimpin yang Memperjuangkan Kepentingan Nasional

## Kunjungan Mahasiswa Universitas Mulawarman ke Lemhannas RI

Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Mulawarman mengunjungi Lemhannas RI (5/3). Kunjungan tersebut diterima oleh Kabag Protdok Rohumas Settama Lemhannas RI, Kolonel Laut (P) Eddy Tarjono sebagai perwakilan Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI di Ruang Syailendra, Gedung Astagatra Lt. 3 Lemhannas RI.



**P**ara mahasiswa mendapatkan materi mengenai "Kompetisi dan Prediksi Tren Strategi yang Bergejolak di Era Global" dari Mayjen TNI (Purn) Abdul Chasib, Tenaga Profesional Bidang Strategi dan Kewaspadaan Nasional Lemhannas RI. Mengawali diskusi, Abdul Chasib memberikan perumpamaan bahwa negara seperti manusia. "Karena negara sama seperti manusia, maka sebagai makhluk sosial negara harus saling berinteraksi," kata Abdul Chasib. Menurutnya, di dunia ini kalau sebuah negara lembek atau lemah maka akan menjadi santapan, untuk itu sebuah negara harus memperkuat dirinya sendiri.

Negara-negara harus mewaspadaai adanya benturan yang terjadi antar negara. "Benturan atau konflik dan kerjasama adalah wajar terjadi antar negara, hal tersebut terjadi karena adanya gap tiap negara dimana masing-masing negara memiliki kepentingan nasional," Abdul Chasib melanjutkan. Abdul Chasib kembali menjelaskan bahwa konflik adalah sifat mendasar adanya persaingan dan benturan kepentingan negara. Menurutnya, kompetisi dan benturan tersebut melahirkan gap yang mencakup ekonomi, politik, keamanan, sosial, dan budaya. Kompetisi

tersebut melahirkan perebutan sumber kekayaan alam. Dalam interaksi antar negara, yang perlu diwaspadai adalah adanya rekayasa konflik, karena rekayasa itu dibentuk oleh aktor tertentu yang memiliki kepentingan. Kepentingan yang dipertahankan oleh Indonesia yaitu survival (pertahanan), vital (modal), dan peripheral.

Dalam level global, benturan dan kerjasama selalu beriringan. Akan tetapi sebuah negara harus mampu mengelola konflik dan benturan yang ada, antara lain dengan dilakukan kerjasama baik dalam level regional maupun nasional, seperti APEC, BRICS, TPP, FONOP, PIVOT, AIIB, FONOP, dan OBOR. Akan tetapi saat ini, Indonesia masih menghadapi permasalahan. Menurut Chasib, Indonesia saat ini masih belum berkedaulatan penuh. "Dari udara maupun laut, Indonesia masih belum berdaulat. Supaya Indonesia dapat dikatakan berdaulat, maka negara ini harus memiliki batas-batas yang jelas," Chasib menambahkan.

Diskusi yang mengemuka yaitu pertanyaan dari mahasiswa mengenai efektivitas strategi gabungan antara *hard power* dan *smart power* yang diterapkan oleh AS di bawah pemerintahan Obama. Menurut Chasib, diplomasi informasi militer merupakan *tools*/alat untuk melakukan

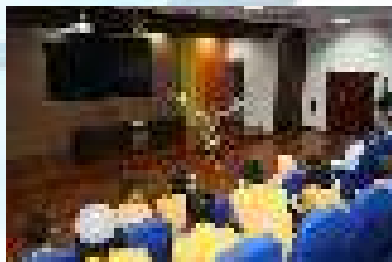
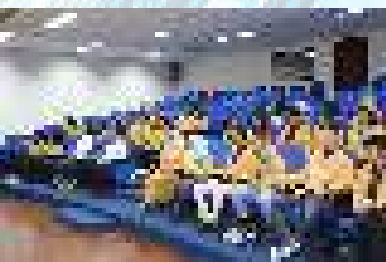
pendekatan/*approach* dengan metode yang bermacam-macam. Sementara itu, saat ini China sudah lebih maju, negara tersebut bukan *smart* lagi tapi *sharp approach*. Di sisi lain, Indonesia memiliki strategi *non-alignment movement*, untuk itu Indonesia harus lebih aktif dalam mencari kepentingan-kepentingan luar yang sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia. Kedua, yang perlu dilakukan Indonesia harus *open shift* yakni harus berkawan dengan yang lain, sebagai bagian dari diplomasi.

Melihat permasalahan yang ada, Indonesia membutuhkan pemimpin yang baik. "Keberhasilan suatu negara bukan karena SDA, tapi kehadiran pemimpin yang memperjuangkan kepentingan nasionalnya," kata Chasib. Menurutnya, untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, dibutuhkan integritas seorang pemimpin. "Pemimpin mampu mengubah yang jelek menjadi yang baik, yang baik menjadi yang lebih baik. Pemimpin yang baik harus memiliki strategi/siasat yang dipengaruhi oleh lingkungan global (nasional, regional, dan global) dan visi/kepentingan nasional yang didukung oleh ketahanan nasional," kata Chasib. Mengakhiri diskusi, Chasib menambahkan, agar

dapat memenangkan kompetisi antar negara global, sebuah negara harus dapat memiliki akses/area, kemandirian, *leadership*, inovasi ekonomi, dan teknologi senjata. Di akhir acara, perwakilan mahasiswa memberikan penampilan tarian khas Dayak yaitu Tari Tunggal. Tarian ini memberikan makna bahwa Indonesia memiliki keragaman budaya yang perlu dipertahankan dan menjadi sumber kearifan lokal. [AS]

“**Pemimpin mampu mengubah yang jelek menjadi yang baik, yang baik menjadi yang lebih baik.**”

- Mayjen TNI (Purn) Abdul Chasib, Tenaga Profesional Bidang Strategi dan Kewaspadaan Nasional Lemhannas RI



# Pelibatan TNI dalam RUU Anti Teror pada Intelle Lemhannas RI

Pembahasan terkait revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme masih terganjal masalah definisi terorisme dan hingga saat ini masih menjadi perdebatan antara pemerintah dan DPR RI. Lemhannas RI memandang isu tersebut sangat penting untuk diangkat dalam forum intelektual dan dilakukan diskusi mendalam dengan menghadirkan para tokoh yang berkompeten terkait dengan permasalahan itu. Oleh karena itu, diselenggarakan kegiatan Intellectual Exercise Forum Berbagi Ilmu dengan menghadirkan tiga orang narasumber yaitu Dirjen Strahan Kemhan RI Mayjen TNI Muhammad Nakir, S.I.P., M.H., Staf Ahli Bidang Hankam Wantannas Mayen TNI Toto Siswanto, S.I.P., M.M., dan seorang Pakar Hubungan Internasional Edy Prasetyono, Ph.D, serta empat orang sebagai penanggap utama yaitu Sahli TK III Bid. Politik Keamanan Nasional Panglima TNI Laksda TNI Muchammad Richard, S.H., M.M., Tenaga Profesional Bidang Hukum dan HAM Lemhannas RI Irjen Pol (Purn) Dr. E. Winarto Hadiwasito, S.H., M.Si., Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, dan Peneliti The Habibie Center Muhamad Arif, M.Sc.



**S**elama hampir dua tahun, RUU Anti Teror digodok oleh para anggota DPR RI dan terjadi perdebatan panjang terkait terminologi terorisme, padahal terorisme terus berkembang dan dapat mengancam keamanan nasional kapanpun. Seperti yang disampaikan oleh Mayjen TNI Nakir bahwa terorisme sudah berkembang dari waktu ke waktu dan menjadi semakin modern. "Terorisme sudah masuk ke dalam level e-crime, cyber espionage, dan cyber sabotage. Bergesernya sasaran terorisme, pola serangan, bahkan kemampuan. Bisa jadi kemampuan teroris lebih tinggi dari kita," ujar Nakir.

Nakir merasa keberatan dengan konsep terorisme yang ditawarkan oleh DPR RI, karena menurutnya terorisme merupakan bentuk perbuatan yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, sehingga menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek yang vital dan strategis. "Apakah teroris hanya terkait dengan tindak pidana? Orang Indonesia hanya berpikir teroris sebagai tindak pidana. Berbeda dengan negara lain, yang memandang

teroris sebagai ancaman terencana dan terorganisir,"ujarnya.

Keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme juga menjadi salah satu bahasan dalam Forum Berbagi Ilmu, karena isu ini juga masih menjadi perdebatan antar pemerintah dengan DPR RI. Menurut Nakir, TNI memiliki fungsi penangkalan dan penindakan terorisme, dan fungsi tersebut merupakan bagian dari tugas pokok TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI.

"TNI dilihat sebagai unsur lain dalam kekuatan negara. Kebijakan tugas TNI dalam penanganan terorisme, penangkal dan mencegah penggunaan wilayah NKRI oleh pihak asing, kita juga melakukan pengamatan, pengawasan dan pengamanan, melakukan koordinasi dan pembinaan kesadaran akan bela negara. Kami juga diikutkan dalam diklat anti teror, serta yang berkaitan dengan multi dimensi," ujar M.Nakir.

Staf Ahli Bidang Hankam Wantannas Mayen TNI Toto Siswanto, S.I.P., M.M., berpendapat bahwa masih terdapat perbedaan persepsi dalam memaknai terorisme itu sendiri, dan diakui memang di berbagai negara memiliki konsep mengenai terorisme yang berbeda-beda. Sebagai contoh di Amerika Serikat yang mengedepankan tentara dalam hal penanggulangan terorisme. Begitu pula dengan konsep



# Actual Exercise

*“Terorisme merupakan tindak pidana. Fungsi pemberantasan tindak pidana terorisme bergantung kepada wilayah kewenangan instansi yang menangani – Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo”*

terorisme di Turki yang berada di bawah Pakta Pertahanan Nato. “Artinya *full militer* yang menangani, sehingga di Turki PKK yang menghadapi militer, akan tetapi ada juga kelompok terorisme yang hanya mengancam kamtibmas sehingga yang dikedepankan adalah polisi,” jelasnya. Sedangkan untuk konteks terorisme di Indonesia, seharusnya dapat bercermin dari sudut pandang negara-negara lain, apakah terorisme yang dihadapi hanya dalam konteks tindak pidana, atau terorisme yang bertujuan mengganggu stabilitas negara. Toto mengambil contoh kejadian di Marawi oleh kelompok ISIS, menurutnya yang terjun ke lapangan adalah TNI gabungan Intelijen, tetapi dalam spektrum yang lebih kecil, Polisilah yang menghadapi, sedangkan dalam spektrum yang besar TNI yang di terjunkan.

Toto menyoroti dari sudut pandang akademis bahwa permasalahannya berada pada persepsi keamanan nasional yang masih berbeda-beda antar pihak, sehingga menghambat pembentukan UU Kamnas. “Di sini kami mengatakan bahwa terorisme hanya mengancam kamnas (menurut buku putih 2008), namun di dalam buku putih tahun 2015 sudah tidak digunakan, karena sesuai dengan teori yang kita pelajari, maka dikembalikan pada kepentingan nasional kita,” katanya.

Tak jauh berbeda dengan yang diungkapkan oleh narasumber ke tiga, Edy Prasetyono, bahwa menurutnya banyak definisi terorisme yang mencuat, di antaranya aksi kekerasan untuk menciptakan rasa takut, ada pula yang ditunggangi oleh motif politik dan tujuan ideologis, dan yang terakhir terdapat korban yang indiscriminate jadi siapa saja bisa menjadi korban. “Bagi saya pribadi, apapun definisinya itu tidak akan pernah mengurangi bahwa militer digunakan, sepanjang pemimpin memutuskan. Untuk menanggapi demo pun boleh, sepanjang ditetapkan oleh pimpinan,” katanya.

Edy menilai kesalahan terbesar dari UU yang ada yakni hanya menempatkan terorisme semata-mata sebagai tindak pidana. Karena menurutnya seperti peristiwa yang terjadi di Marawi serta kasus bom lainnya yang dianggap lebih dari sekedar tindak pidana. Perlu ada keputusan politik sebagai bentuk pengambil keputusan jika suatu waktu terjadi ancaman. “Siapa yang melakukan *assesment*? Wantannas, Kementerian Dalam Negeri, Kemhan, bagi saya itu adalah instrumen presiden, atau mau diambil dari BIN, atau Kemenlu. Saya tidak peduli dengan perdebatan yang lalu, itu wasting of time ini persoalan politik yang perlu diatasi,” ujarnya.

Laksda TNI Muchammad Richard sebagai penanggap secara lugas mengatakan bahwa jika TNI dilibatkan dalam hal ini, tidak menjadi masalah. Begitu pula dengan pelaku terorisme bila sudah tertangkap maka sudah menjadi domain polisi untuk memproses secara hukum. “Permasalahan utama, TNI boleh berperan atau tidak? Kalau boleh, apa yang menjadi masalah? Begitu juga terorisme, bila sudah menangkap, diproses diserahkan ke polisi, maka sudah selesai,” katanya. Begitu pula dengan tanggapan dari Irjen Pol (Purn) Winarto yang mengungkapkan jika sebenarnya TNI haruslah dimasukkan kedalam revisi UU Anti Teror, karena apabila negara tidak bisa menghadapi terorisme, maka dianggap

sebagai negara yang lemah dan absen dalam melindungi warga negaranya.

Proses revisi UU menyita waktu yang panjang selama dua tahun, menurutnya akan lebih baik jika UU Anti Teror yang sudah ada tidak perlu dilakukan revisi, tetapi justru dengan lebih mendetailkan UU Nomor 34 tahun 2004 tentang Tugas Pokok TNI saja. “Perdebatan soal pelibatan TNI sudah dibuka sangat detail di UU No.34, tapi tidak ada penjelasan untuk skala yang seperti apa. Kami di Komnas HAM menyampaikan saran untuk membuat aturan yang lebih spesifik di UU No.34 soal peran TNI di penindakan terorisme, sehingga jelas sasaran dan skalanya. Itu menurut kami jalan keluarnya, sekali lagi terorisme tidak hanya dari level yang masif, tapi juga sejak awal,” ujar Choirul Anam.

Peneliti dari The Habibie Center Muhammas Arif menanggapi tentang keterlibatan TNI, karena faktanya TNI sudah terlibat jauh dalam penanggulangan terorisme, dan secara komperatif militer mempunyai ruangnya sendiri dengan pola yang berbeda. “Ini kan instrumen negara, kenapa negara berat sekali mengarahkan *resource* yang dimiliki. Sistem keamanan nasional harusnya dibuat dengan lebih fleksibel, sedangkan ancaman keamanannya dibuat lebih rigid,” katanya.

Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam paparannya menyebutkan bahwa pelibatan TNI dalam memberantas terorisme harus segera dibicarakan, sebab bila menunggu dikonsultasikan dengan DPR maka dikhawatirkan akan menimbulkan korban. Agus Widjojo dalam kesempatan tersebut mengutip definisi terorisme dari Oxford Dictionary, “Terorisme dalam Oxford Dictionary disebutkan bahwa the unlawful use of violence and intimidation, especially against civilians, in the pursuit of political aims.” (Penggunaan kekerasan dan intimidasi yang tidak sesuai dengan hukum, terutama dalam melawan masyarakat sipil, dengan tujuan politis).

Menurut Agus Widjojo, ada beberapa permasalahan yang ada saat ini terkait dengan penanggulangan terorisme yaitu batasan pengertian terorisme, terorisme apakah termasuk KUHP atau kejahatan serius, siapa yang memegang tanggung jawab fungsi pemberantasan tindak pidana terorisme, serta apa peran TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

“Terorisme merupakan tindak pidana. Fungsi pemberantasan tindak pidana terorisme bergantung kepada wilayah kewenangan instansi yang menangani,” kata Agus Widjojo. Ia melanjutkan, apabila terjadi di dalam negeri, maka menjadi tanggung jawab fungsi penegakkan hukum oleh instansi penegak hukum, di antaranya POLRI. Agus Widjojo menambahkan, TNI dapat memasuki wilayah kewenangan penegakkan hukum dalam negeri berdasarkan ketentuan pengerahan dan kewenangan TNI. “TNI dapat membantu pemerintahan sipil berdasarkan keputusan politik ataupun sebagai akibat pernyataan keadaan darurat militer. Apabila terjadi di luar wilayah yurisdiksi sistem hukum nasional, maka menjadi tugas dan kewenangan TNI,” kata Agus Widjojo. [AS]



# Pemimpin dengan Pancasila Menjadi Indonesia Lebih Baik

Prof. Dr. Muladi, S.H.,

Dalam Indeks Kepemimpinan Nasional Indonesia (IKNI) disebutkan bahwa salah satu parameternya yaitu berorientasi pada pemikiran rasional bukan emosional. Dalam IKNI disebutkan bahwa terdapat sebuah pemikiran dimana pemimpin harus melihat kebijakan sebagai mekanisme pengintegrasian dari segala kepentingan.

**T**erkait hal tersebut, Prof. Dr. Muladi, S.H., memiliki pandangan serupa. Menurutnya, kemajuan teknologi, maupun ekonomi sebagai suatu sumber daya yang potensial memang cukup penting, namun yang jauh lebih penting adalah tujuan politik yang ingin dicapai oleh suatu negara (*goal portions*).

"Negara harus mempertahankan budaya, kita tidak boleh berpikir secara sepotong-sepotong, tetapi harus berpikir sistemik, dan berorientasi pada tujuan yang besar atau *grand strategy*," ujar Prof. Muladi pada saat memberikan ceramah kepada peserta PPRA LVII di Lemhannas RI (18/4). Pemimpin harus melihat tidak hanya pada kepentingan pribadi dan kelompok, tetapi secara menyeluruh dari keseluruhan subsistem yang saling terkait satu sama lain, dan apabila terjadi perubahan maka berdampak pula pada subsistem lainnya.

"Kalau (ingin) mengubah sesuatu pasti yang lain bisa berubah dan ada keterbukaan antar subsistem, dan tidak boleh saling menutupi. Harus ada transparansi.

Setiap perubahan selalu terjadi kompetisi antar nilai yang bersentuhan, oleh karenanya mekanisme pengendalian menjadi sangat penting dalam sistem," ujarnya.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar yakni 262 juta jiwa, siapapun pemimpinnya, hendaknya dalam mencapai tujuan nasional sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD tahun 1945, bangsa Indonesia harus berpedoman pada empat konsensus dasar bangsa. "Negara kita negara besar dengan jumlah penduduk yang besar, yang penting adalah kepentingan nasional dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, ini harus mewarnai setiap langkah pemimpin yang ada di Indonesia. Dengan Pancasila kita menjadi lebih baik, negara lain sangat memuji keberagaman yang ada di Indonesia. Disitulah pemimpin harus mengelola di semua bidang dalam mencapai tujuan cita-cita nasional," ujarnya.

Priyang pernah menjabat sebagai Gubernur Lemhannas RI dari tahun 2005 sampai 2011 itu pun mengomentari terkait pernyataan yang dilontarkan oleh Prabowo Subianto hingga menjadi kontroversi yang mengatakan bahwa



Bagi Prof. Muladi, demokrasi bukan efisiensi semata, tetapi harus mampu dipertanggungjawabkan, seperti beberapa karakter demokrasi yang baik, yakni adanya desentralisasi wewenang, mendukung promosi atau kemajuan serta perlindungan HAM, kebebasan pers yang harus selalu dikawal dengan pers/media yang profesional, penghargaan terhadap *civil society* (masyarakat madani) seperti adanya eksistensi Lembaga Swadaya Masyarakat, serta adanya kontrol sipil terhadap militer.

"Jika bangsa Indonesia ingin maju, maka harus dapat menyesuaikan diri dengan dinamika yang sedang berkembang, namun tetap dengan mempertahankan budaya. Kita harus menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan. Kita harus membuka preambule UUD 1945, arah kita kesana yaitu cita-cita nasional yang dirumuskan oleh para *founding fathers* bangsa yang pada waktu itu sudah memikirkan tentang globalisasi, dan sekarang terbukti," ujarnya. [AS]

Indonesia akan bubar pada tahun 2030. Dengan santai Prof. Muladi mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Prabowo hanyalah sebuah peringatan apabila para pemimpin bangsa ini tidak bisa mengelola empat konsensus dasar bangsa dengan baik.

"Ini hanya peringatan dari Pak Prabowo, kalau Indonesia tidak bisa mengelola dengan baik empat konsensus itu. Kita sudah biasa mengelola konflik yang besar dan kecil. TNI dan Polri sebagai 'penjaga gawang' tidak boleh berpolitik praktis," kata Prof. Muladi melanjutkan.

Ia menyebutkan bahwa seseorang yang dianggap sebagai *leader* (pemimpin) harus mampu mengendalikan kehidupan mulai dari organisasi yang kecil sampai pada tingkat nasional, serta dapat menjadi motivator bagi pengikutnya untuk berbuat sesuatu dalam mencapai tujuan. "Inti dari kepemimpinan ada visi ada simpati. Visi jelas mengenai kehidupan, dan menimbulkan simpati, baik internal maupun eksternal antar negara," katanya.

Menurut Prof. Muladi, berbicara mengenai visi, maka harus dikembalikan pada konstitusi negara sebagai elemen dasar dalam berdemokrasi. Dimana jika suatu negara menjalankan sistem demokrasi harus memenuhi syarat mutlak kehidupan demokrasi, seperti memiliki sikap setia kepada konstitusi yang dibangun secara demokratis, menjunjung tinggi penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil), prinsip *good governance* (pemerintah yang bersih dan berwibawa), memiliki kepastian hukum dan kekuasaan kehakiman yang merdeka, serta hukum yang bersifat demokratis.



***"Seseorang yang dianggap sebagai leader harus mampu mengendalikan kehidupan, mulai dari organisasi yang kecil sampai pada tingkat nasional, serta dapat menjadi motivator bagi pengikutnya untuk berbuat sesuatu dalam mencapai tujuan"***

**-Prof. Dr. Muladi, SH.**



## TB Silalahi, Cerita Kepemimpinan Visioner Tokoh Indonesia di Masa Lampau

Letjen TNI (Purn) Dr. HC. T.B. Silalahi, mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden SBY memberikan ceramah kepada peserta PPRA LVII di Ruang NKRI, Lemhannas RI (25/4). Ia telah berpengalaman dalam mendampingi dan memberikan pertimbangan Presiden RI. Pada kesempatan kali ini, TB Silalahi diminta untuk berbagi pengalamannya kepada peserta PPRA LVII Lemhannas RI tentang bagaimana ciri "*Visionaries E-Leadership*".

Jika kita mengenal istilah "*Born to be a Leader*" (dilahirkan menjadi sorang pemimpin) tetapi menurutnya itu hanya satu persen sedangkan 99 persennya adalah kemampuan yang harus dibina. "*Leadership* (kepemimpinan) itu seni dan bakat tapi juga dipelajari karena perkembangan lingkungan oleh karena itu disebut *art and science* (seni dan ilmu pasti). Lemhannas ini lembaga untuk mendidik *potential leader* (pemimpin yang berpotensi), *you are is a potential leader*, jadi sekolah ini walau tidak secara langsung juga berpengaruh," ujar TB Silalahi kepada para peserta PPRA LVII.

Menurut T.B. Silalahi, syarat mutlak seorang pemimpin nasional yakni harus berintegritas *man of integrity* (manusia yang berintegritas) dan terhormat *man of honor* (manusia terhormat), memiliki IQ yang tinggi, diimbangi dengan EQ yang stabil, dan disempurnakan dengan SQ. "*Man of honor*, dipopulerkan oleh General Douglas Mac Arthur seorang jenderal dan marsekal lapangan bintang lima asal Amerika dari Angkatan Darat Filipina, ada istilah '*duty, honor, and country*' yang berarti kehormatan dalam melaksanakan tugas untuk bangsanya," jelas T.B. Silalahi. Ia membeberkan pula kepada para peserta tentang empat ciri pemimpin yang terhormat seperti Sikap Ksatria (*Gentlemanly Conduct*), Setia (*Personal Fealty*), Persaudaraan (*Brotherhood*), dan Berjiwa Samurai (*The Pursuit of Glory*).

Ciri di atas menurutnya dimiliki oleh para tokoh pemimpin bangsa Indonesia di masa lampau. "Indonesia memiliki sosok besar yang dapat menjadi contoh bagi bangsa. Hal ini seperti ketika sosok Bung Hatta yang diminta untuk menjadi Presiden PRRI namun dengan tegas beliau menolak dan menjawab 'Apabila Hatimu Gundah, Pandangilah Merah Putih Itu'," kata T.B. Silalahi. Di samping itu, pemimpin harus dapat mempersatukan rakyatnya untuk bersaudara, hal ini yang dianggap masih sulit diterapkan di Indonesia, dimana masih sering terjadi konflik simbolik (lewat kata-kata makian) meski belum

sampai pada konflik fisik. Selain itu, yang tak kalah pentingnya pemimpin harus berjiwa samurai, seperti kutipan dari Jenderal Ahmad Yani yang menyiratkan pemimpin yang berjiwa samurai, "Kepemimpinan memiliki risiko, Anda mungkin kehilangan hidup Anda, tetapi ketika para pemimpin tidak siap mengambil risiko, negaralah yang harus membayarnya," kata T.B. Silalahi.

Pemimpin yang visioner mampu melihat ke depan melebihi penglihatan orang lain, seperti Bung Karno pemimpin reformasi dengan visi revolusi. "Visi Bung Karno, nomor satu adalah nyanyian lagu Indonesia Raya, lirik bangunlah jiwanya bangunlah badannya, yang baru kita bangun badannya, jiwanya belum bangun. Selain itu *national building*, di samping membangun negaranya tapi juga bangun karakternya. Itulah visi Bung Karno," ujarnya.

Dilanjutkan dengan masa kepemimpinan Presiden Soeharto yang memiliki visi membangun karakter dengan menciptakan Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (BP7), serta dijalankannya otonomi daerah untuk mengurangi tindakan korupsi di tingkat kepala daerah. Kemudian digantikan oleh sosok Habibie yang kembali mencari identitas Bangsa Indonesia. "Kita bangsa bahari sebagai negara kepulauan, kita harus jadi produsen dan memproduksi sendiri pesawat terbang," ujar TB sembari menirukan gaya Presiden Habibie.

Begitu pula dengan gaya kepemimpinan Presiden ke empat Gus Dur yang walaupun dengan keterbatasan penglihatan, namun memiliki visi yang kuat untuk menempatkan Indonesia pada persaingandunia. Berbedadari pendahulu-pendahulunya, Megawati bertekad melanjutkan cita-cita sang Ayah, Bung Karno. Menurut TB memang bukan suatu persoalan mudah untuk mewujudkannya dalam masa kepemimpinan tiga tahun. Jokowi mengikuti jejak Megawati yaitu mengulang visi Bung Karno, terlihat dari visi yang selalu digadang-gadangkan yaitu Revolusi



Mental, dengan membangun karakter mentalitas, dan kehormatan, melalui UKP-PIP, dan Unit Kerja Presiden.

Berbicara soal *E-Leadership* dimana seorang pemimpin berada di tempat yang berbeda dengan orang lain yang dipimpinnya atau sering dikenal dengan *Virtual Leadership*. Terdapat beberapa ciri *E-Leadership* di antaranya kepemimpinan kearah horizontal ketimbang vertikal, lebih tersebar dan terpisah secara jarak, ruang dan waktu, *decission making process* lebih cepat dan akurat, dengan jangkauan yang lebih luas, serta dilakukan dalam organisasi yang kecil sampai yang besar sekali.

"Nasihat kepada kalian, jangan hanya percaya pada teknologi, namun percaya pada orang yang berhasil dengan teknologi, untuk membantu Anda menciptakan, membuat digital menjadi nyata, untuk kekuatan informasi, memajukan cara hidup kita, dan melakukan hal-hal penting,"

katanya.

Di akhir ceramahnya, lelaki yang juga alumni KRA XVI Lemhannas RI ini menekankan kepada para peserta PPRA LVII agar dalam bekerja memajukan organisasi yang dipimpinnya ke depan, bisa mengubah kultur bekerja. "Untuk ke depan supaya maju organisasi yang Anda pimpin dan Anda pun mendapat promosi, baik pemerintahan, LSM, atau organisasi masyarakat, harus bekerja merubah kultur, bawa orang-orangmu berpikir lebih cepat, *work smarter* (bekerja lebih pintar), lebih bijak dalam bekerja, dan bergerak lebih ganas. Sekarang pertanyaannya siapa Anda? Anda adalah pemimpin jenis baru, Lemhannas menjadi *school for the new leader*, itulah Anda yang bisa merubah negara ini," tegasnya. [AS]

“Kepemimpinan memiliki risiko, Anda mungkin kehilangan hidup Anda, tetapi ketika para pemimpin tidak siap mengambil risiko, negaralah yang harus membayarnya,”

- Letjen TNI (Purn) Dr. HC.  
T.B. Silalahi, mantan Ketua Dewan  
Pertimbangan Presiden



# Langkah Indonesia Menghadapi Kebijakan Amerika Serikat dan China

Lemhannas RI menyelenggarakan *Roundtable Discussion* (RTD) Kajian Jangka Panjang mengenai "Implementasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Guna Menghadapi Kebijakan Amerika Serikat dan China dalam rangka Ketahanan Nasional" di Ruang Kresna Lt. 4 Gedung Astagatra, Lemhannas RI (9/5). Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo.

**I**su mengenai kebijakan luar negeri Indonesia menghadapi kebijakan AS dan China saat ini menjadi penting untuk dibahas di tengah dinamika internasional dimana kini tengah terjadi perebutan sumber daya alam di dunia. Selain itu, Indonesia juga dihadapkan dengan dinamika internasional yakni kebijakan Amerika Serikat (*American First*) serta menguatnya pengaruh ekonomi dan politik Republik Rakyat China di bawah kepemimpinan Xi Jin Ping.

RTD menghadirkan narasumber yaitu Anggota Wantimpres Suharso Monoarfa, Rektor Unhan Letjen TNI Dr. Yoedhi Swastanto, M.B.A., Deputy Menko Perekonomian RI Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Dr. Rizal Affandi Lukman, dan Wamenlu Dr. A.M. Fachir. Sedangkan sebagai penanggap yaitu Ketua Dewan Analisis Strategis BIN Letjen TNI (Purn) M. Munir, Ekonom Faisal Basri, Perwakilan Ketua Umum KADIN Indonesia Dr. Timotius Lesmana, dan Peneliti Centre for Chinese Studies Indonesia Rene Pattiradjawane. Diskusi dimoderatori oleh Tenaga Profesional Bidang Strategi dan Hubungan Internasional Lemhannas RI, Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan.

Memulai diskusi, Suharso Monoarfa menyebutkan bahwa saat ini Amerika Serikat dan China melakukan perebutan kekuasaan terkait dengan teknologi masa depan serta dapat menjadi ancaman terhadap Indonesia. "Negara-negara saat ini tengah melakukan perebutan kekuasaan soal teknologi masa depan, hal tersebut sudah diperhitungkan sejak sekitar 40 tahun yang lalu oleh China," kata Monoarfa.

Ekspansi China, menurut Yoedhi Swastanto, juga semakin menguat. "China saat ini tengah melakukan ekspansi berupa peningkatan konektivitas ke Eropa dan Asia. Akan tetapi, kita perlu bersyukur karena saat ini Indonesia sedang mengejar pembangunan infrastruktur melalui program pemerintah yaitu Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia," kata Yoedhi Swastanto.

Di tengah dinamika internasional, Indonesia saat ini perlu mewaspadaai intensifnya ekspansi China ke negara-negara di dunia, termasuk negara-negara di Asia dan Afrika. "Besarnya ekspansi China ke dunia internasional antara lain dipengaruhi oleh aksi balasan negara tersebut, mulai dari produk metal (besi, baja, dsb.) hingga produk agrikultur. Besarnya ekspor China ke Indonesia berakibat



pada membanjirnya produk China di Indonesia,” kata Dr. Rizal Affandi Lukman. Ekspansi kedua negara tersebut menjadi potensi ancaman bagi nasional Indonesia. Menurut Letjen TNI (Purn) M. Munir, Ketua Dewan Analisis Strategis BIN mewakili Kepala BIN, “Era kompetisi sekarang antara AS dan China karena didorong oleh teknologi. China pada era Deng Xiao Ping sudah memikirkan hal ini, dengan mengirim pemuda-pemudanya untuk belajar dan mencuri ilmu dari negara-negara mereka. Jadi tidak kaget bila saat ini ada tuduhan AS bahwa China mencuri ilmu dari negara-negara yang pernah dikunjunginya, yang perlu disikapi dari AS adalah sikap dari presiden Trump yang konfrontatif.” Sementara itu, menurut ekonom Faisal Basri, saat ini tidak ada perang antara China dan AS karena saat ini antar negara terjadi interdependensi, ketergantungan yang didukung oleh kerjasama perdagangan oleh berbagai negara, akan tetapi yang perlu diperbaiki adalah kondisi domestik Indonesia sendiri.

Dalam perkembangannya, Indonesia perlu menyikapi dinamika ekonomi dan politik AS dan China. “Tidak hanya Indonesia, negara maju di dunia seperti Singapura kini juga telah menyikapi besarnya pengaruh Amerika Serikat dan China, yakni dengan melakukan kerjasama perdagangan dengan Amerika Serikat dan China. Akan adanya proses dinamika baru di kawasan, yang diakibatkan oleh dinamika perang Amerika dan ASEAN. Singapura adalah negara satu-satunya di ASEAN yang bekerja sama dengan Amerika Serikat dan China,” kata Dr. Rizal.

Saat ini, Indonesia juga telah melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat dan China. Khusus untuk kerjasama dengan China, Indonesia telah melakukan kerjasama strategis baik dalam bidang informasi maupun perdagangan alutsista. “Pertahanan terbaik dalam diplomasi luar negeri adalah memperbaiki kondisi domestik Indonesia,” kata Faisal Basri. “Kalau kita ingin berlari maraton, ayo kita perbaiki diri kita sendiri dari

sekarang. Bagian menyedihkan dari Indonesia adalah saat ini kita terlalu sering *inward looking*, karena terlalu bangga melihat dengan GDP terbesar padahal itu dibagi oleh jumlah penduduk yang besar. Padahal, 261,1 juta penduduk (penduduk Indonesia) tentu lebih kecil dibanding 7.5 milyar penduduk,” kata Faisal Basri.

“*Kalau kita ingin berlari maraton, ayo kita perbaiki diri kita sendiri dari sekarang! Bagian menyedihkan dari Indonesia adalah saat ini kita terlalu sering inward looking.*”  
– **Ekonom, Faisal Basri**

# Agus Widjojo Titipkan Tanggung Jawab Settama Lemhannas RI pada Komjen Pol Iriawan

**M**antan Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irijen Pol. Drs. Mochamad Iriawan, S.H.,M.M.,M.H., resmi menggantikan posisi Komjen Pol. Drs. Arif Wachyunadi. Adapun Komjen Pol. Drs. Arif Wachyunadi saat ini tengah memasuki masa pensiunnya. Dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang diselenggarakan pada (30/4), Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai sarana regenerasi dalam pembinaan karir bagi personel Lemhannas RI.

"Bagi Lemhannas RI pelantikan memiliki jabatan yang penting dan strategis sebagai jawaban dari tuntutan dan tantangan tugas kepercayaan dan kesempatan yang harus diberikan negara kepada pejabat yang dilantik dan merupakan amanat yang harus dijalankan dengan ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab," ujar Agus Widjojo. Pelantikan dilakukan di Ruang Dwiwarna Purwa Gedung

Pancagatra Lemhannas RI, yang disaksikan oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, sejumlah pejabat struktural Lemhannas RI, dan pengurus Perista.

Sestama merupakan jabatan pimpinan tinggi madya yang juga sebagai jabatan strategis dari suatu lembaga pemerintahan non kementerian yang memiliki peran penting bagi lembaga terkait. Agus Widjojo berpesan kepada Iriawan bahwa, "Jabatan Sestama memiliki peranan yang sangat menentukan bagi instansi pemerintahan, untuk itu saya berpesan agar melihat tantangan strategis dengan mempertahankan apa yang sudah baik, dan memperbaiki serta meningkatkan hal-hal yang menjadi bahan evaluasi, sehingga penyelenggaraan berbagai kegiatan, mulai dari perencanaan, pembinaan, dan pengendalian administrasi dan sumber daya, berjalan efektif dan efisien," katanya.

Secara fungsional, Sestama juga berwenang dalam pengelolaan keuangan dan anggaran negara di lingkungan





Lemhannas RI. Oleh karena itu, keberadaannya sangat mempengaruhi pencapaian kinerja lembaga secara menyeluruh. Selain itu, Gubernur menambahkan, "Sestama diharapkan mampu mewujudkan sinergi di antara unit kerja dalam suasana yang kondusif dan harmonis, menciptakan ide-ide yang kreatif dan inovatif guna menunjang tugas sebagai pimpinan, mampu memotivasi dan menjadi inspirasi bagi jajaran di bawahnya agar Lemhannas RI mampu menunjukkan kinerja dan performa kelembagaan yang diharapkan."

Ia percaya bahwa dengan bekal pengalaman tugas yang dimiliki, Iriawan mampu menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawabnya yang baru sebagai Sestama, serta mampu bersinergi dengan seluruh komponen di lembaga ini untuk mewujudkan visi Lemhannas RI sebagai *World Class Institute*.

"Saya percaya, Saudara akan cepat dapat menyesuaikan diri dengan tugas yang baru. Berbekal pengalaman tugas yang Saudara miliki dan sinergi yang solid, kita mampu secara bersama-sama untuk mewujudkan harapan besar masyarakat, bangsa dan negara yang dipercayakan kepada Lemhannas RI," ujarnya.

Agus Widjojo usai melakukan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan tak lupa mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Komjen Pol. Drs. Arif Wachyunadi yang telah mengabdikan kepada Lemhannas RI selama kurang lebih dua tahun masa jabatan. [AS]

“

*"Sestama diharapkan mampu mewujudkan sinergi di antara unit kerja dalam suasana yang kondusif dan harmonis, menciptakan ide-ide yang kreatif dan inovatif guna menunjang tugas sebagai pimpinan, mampu memotivasi dan menjadi inspirasi bagi jajaran di bawahnya agar Lemhannas RI mampu menunjukkan kinerja dan performa kelembagaan yang diharapkan"*

*-Gubernur Lemhannas RI  
Letjend TNI (Purn) Agus Widjojo.*



# Peringatan HUT ke Lemhannas RI



**M**enginjakkan usianya di angka 53 tahun, telah banyak pencapaian yang diraih Lemhannas RI dalam mewujudkan visinya sebagai *World Class Institution* (Lembaga Berkelas Dunia) yang mampu merespons dinamika kehidupan nasional yang terus berkembang dari masa ke masa.

Perjalanan panjang yang ditempuh bukan tanpa hambatan, melihat ekspektasi dan kepercayaan masyarakat yang begitu tinggi terhadap Lemhannas RI, sudah menjadi kewajiban bagi seluruh personel Lemhannas generasi sekarang untuk meneruskan cita-cita para pendahulunya, tentunya dengan meningkatkan kapasitas serta kapabilitas diri dan kelembagaan.

Melalui tugas dan fungsinya, Lemhannas RI selalu berupaya untuk merejuvenasi nilai-nilai yang terkandung

di dalam empat konsensus dasar bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, di tengah-tengah masyarakat. Dalam Peringatan Hari Lahir ke-53 Lemhannas RI, diselenggarakan rangkaian kegiatan mulai dari bakti sosial yang dilakukan oleh para anggota Perista, Pemilihan Pegawai Teladan, Perlombaan MTQ, Donor Darah, Orasi Ilmiah, Perlombaan dan Pertandingan Olahraga hingga pada puncak acaranya diselenggarakan Upacara dan Syukuran Buka Puasa Bersama seluruh personel Lemhannas RI.





## Upacara Parade Peringatan HUT ke-53 Lemhannas RI

**P**uncak acara Peringatan HUT ke-53 Lemhannas RI yaitu dilakukan dengan Upacara Parade yang diselenggarakan di Lapangan Tengah Lemhannas RI pada (21/5) sore. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo sebagai inspektur upacara, dan dihadiri di antaranya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kepala BNN Inspektur Jenderal Heru Winarko, Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, Sestama Lemhannas RI Komjen. Pol. Mochamad Iriawan, Ketua IKAL, Pengurus Perista, Para Tajar, Taji, dan Taprof Lemhannas RI, Peserta PPRA LVII dan LVII, serta segenap pegawai Lemhannas RI.

Dalam amanatnya, Agus Widjojo mengatakan bahwa seiring berjalannya waktu, berbagai capaian dan prestasi yang telah ditorehkan oleh Lemhannas RI telah banyak diakui oleh berbagai kalangan. Namun tak dipungkiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih terdapat banyak kekurangan yang harus terus diperbaiki ke depannya.

“Saat ini, masyarakat menaruh harapan besar terhadap keberadaan dan peran Lemhannas RI dalam memelihara dan memperkuat wawasan kebangsaan berdasarkan empat konsensus dasar bangsa. Inilah tantangan besar yang harus mampu diantisipasi dan dihadapi oleh seluruh keluarga besar Lemhannas RI,” ujar Agus Widjojo.

Ia menekankan beberapa hal penting kepada para peserta upacara di antaranya untuk selalu berpegang teguh dan mempertahankan cita-cita luhur para pendiri Lemhannas RI, selalu menjaga komitmen dan konsisten pengabdian dengan memperkuat solidaritas dan kebersamaan.

Tak kalah pentingnya, ia menekankan agar semua berupaya untuk mengembangkan budaya strategis yang menjangkau keluar (Outward Looking) tentunya dengan tetap berpegang pada jati diri bangsa dan kepentingan nasional. Di samping itu, diharapkan pula kepada para

peserta upacara untuk dapat mencermati perkembangan lingkungan strategis yang semakin berkembang dinamis, dan menyikapi secara cerdas berbagai isu aktual yang sedang berkembang di masyarakat.

Sudah menjadi suatu kewajiban bagi para generasi penerus Lemhannas RI untuk melanjutkan perjuangan dan cita-cita yang telah dibangun oleh para pendahulunya, dan perlu diingat bahwa berbagai capaian yang telah diraih bukan tanpa fondasi yang kuat yang telah dibangun oleh para pendahulu. “Generasi sekarang harus terus mengembangkan dan meningkatkan kapasitas serta kapabilitas diri dan kelembagaan agar mampu merespons dinamika kehidupan nasional yang berkembang di tengah masyarakat,” ujar Agus Widjojo.

Di hadapan para peserta upacara Gubernur Lemhannas RI memberikan penghargaan kepada empat pegawai Lemhannas RI yaitu Kolonel Laut (S) Trismawan Djonisajoko, S.E., M.M., Kapten CPM Aswin Andika, Serma Bambang Prasetyo, dan Abdul Afief Ahmad atas pengabdianya kepada negara.

Kemudian, kegiatan upacara dilanjutkan dengan acara syukuran dan buka puasa bersama seluruh pegawai Lemhannas RI di Ruang Dwiwarna Purwa Gedung Pancagatra Lemhannas RI. Upacara bersama dilakukan sebagai bentuk syukur atas bertambahnya usia lembaga prestisius Lemhannas RI ini yang telah menginjak angka 53 tahun.

Selepas buka puasa bersama, dilakukan pemotongan tumpeng oleh Gubernur, Wakil Gubernur beserta Sestama dengan didampingi oleh para Istri. “Sebagai wujud rasa syukur kita pada hari ulang tahun Lemhannas RI hari ini, apapun bentuk kegiatan yang diselenggarakan, banyak nilai-nilai yang terkandung dapat diambil. Saya berharap nilai-nilai yang terkandung, kejujuran, toleransi, integritas, dan loyalitas dapat terimplementasi dengan baik dalam kinerja melalui tugas pokok dan fungsi setiap personel,” ujar Agus Widjojo. [AS]

# Orasi Ilmiah dalam rangka HUT ke-53 Lemhannas RI Geopolitik, Ketahanan Nasional, dan Kemerdekaan Sejati “Getankas”

Sebagai rangkaian dari peringatan Hari Ulang Tahun ke-53, Lemhannas RI menggelar orasi ilmiah berjudul “Geopolitik, Ketahanan Nasional, dan Kemerdekaan Sejati ‘Getankas’” bertempat di Auditorium Gajah Mada, Gedung Pancagatra Lt. 4 Lemhannas RI (16/5). Hadir sebagai orator yaitu Kris Wijoyo Soepandji, S.H., M.P.P. yaitu salah satu tokoh muda Indonesia yang memiliki gagasan dan pemikiran mengenai geopolitik Indonesia dan ketahanan nasional Indonesia.

## Indonesia Menghadapi Perang Generasi Keempat

Dalam orasi ilmiah tersebut, Kris menyetujui bahwa perang generasi keempat lebih mengutamakan upaya membangun konstruksi berpikir yang dapat diterima luas dalam kerangka legal dan etika. Perang generasi keempat berbeda dengan perang generasi pertama, kedua, dan ketiga yang masing-masing bertumpu pada kemampuan untuk memobilisasi kekuatan fisik terkonsentrasi, kemampuan senjata berbasis energi, dan level informasi sistem perang.

Kris menambahkan, lepasnya Timor Timur juga merupakan bentuk realita perang generasi keempat. Kekuatan yang dominan akan cenderung menggunakan faktor legal dan etika untuk kemudian diterima oleh masyarakat dunia guna mencapai supremasi di tingkat global.

Menurut Kris, ada dua simpul raksasa yang berperan membangun konstruksi berpikir pada perang generasi keempat, yaitu *global multimedia networks* dan *global financial networks*. Dalam hal ini, suatu pola dan cara pikir yang dibangun disebarkan melalui global multimedia networks. “Lepasnya Timor Timur tidak terlepas dari realita perang generasi keempat tersebut,” kata Kris Wijoyo.

“Bung Karno mengingatkan bangsa Indonesia untuk memetakan kepentingan nasionalnya serta menggunakan potensi nasionalnya secara tepat sehingga tidak asal jiplak konsepsi dari negara-negara lain yang tidak cocok dengan bangsa Indonesia,” lanjut Kris Wijoyo. Oleh karena itu, diperlukan suatu pemahaman geopolitik dalam mengantisipasi dinamika internal dan eksternal.

Kris kemudian melanjutkan bahwa bangsa Indonesia memiliki nilai luhur dalam menghadapi dinamika geopolitik. Pada tahun 1956, Kepala Dinas Psikologi Angkatan Darat yang pertama dan pendiri Fakultas Psikologi Universitas Padjajaran, Mayjen. TNI Prof. Dr. Soemantri Hardjoprakoso dalam disertasinya di Rijksuniversiteit Leiden, telah membedah konsep hubungan Ilahi dengan manusia berdasarkan Sasangka Jati yang disampaikan oleh Soenarto Mertowardojo.

Dalam hal ini, Sasangka Jati pada tahun 1932 telah memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai pentingnya mengendalikan perbuatan manusia melalui jiwa dan pikiran berdasarkan keyakinan kepada Tuhan dan Utusan-Nya. “Hanya dengan pendekatan ini, pengaruh *global multimedia networks* dan *global financial networks* dapat dinetralisir, sehingga bangsa Indonesia memiliki pikiran dan perbuatan yang mencerminkan kemerdekaan yang sejati,” ungkap Kris. “Bung Karno mengingatkan bangsa Indonesia untuk memetakan kepentingan nasionalnya, serta menggunakan potensi nasionalnya secara tepat, sehingga tidak asal jiplak konsepsi dari negara-negara lain yang tidak cocok dengan bangsa Indonesia,” jelas Kris.



## Indonesia di Tengah Geopolitik Dunia

Di tengah geopolitik dalam dan luar negeri yang dinamis, Lemhannas RI memandang penting untuk mengangkat permasalahan geopolitik dalam kaitannya dengan ketahanan nasional Indonesia, serta esensi kemerdekaan sejati dalam kehidupan berdemokrasi Indonesia. Selain itu, tujuan diselenggarakan orasi ilmiah pada peringatan HUT ke-53 Lemhannas RI adalah untuk menambah wawasan dan pengayaan terkait geopolitik, ketahanan nasional dan kemerdekaan sejati.

Lemhannas RI sebagai lembaga yang mempelajari ilmu geopolitik, khususnya geopolitik Indonesia, memiliki tanggung jawab moril terhadap kajian strategis di bidang ketahanan nasional melalui peran dan fungsinya selama ini. “Pada dasarnya geopolitik dan ketahanan nasional sangat terkait erat. Geopolitik merupakan salah satu cara bagaimana kita bisa memahami kondisi geografis kita sebagai bangsa untuk menjalankan sistem politik agar mampu mencapai cita – cita dan tujuan nasional,” kata Agus Widjojo saat membuka kegiatan orasi ilmiah di hadapan para pejabat, pegawai, dan peserta pendidikan reguler.

Agus Widjojo juga mengatakan bahwa geopolitik Indonesia merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri serta lingkungan strategisnya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah atau wawasan nusantara. Sementara itu, dalam proses mencapai cita – cita dan tujuan nasional, diperlukan pula strategi nasional yang juga didasarkan pada kondisi geografis bangsa atau geostrategi Indonesia yang dituangkan dalam sebuah ketahanan nasional sebagai kondisi maupun konsepsi.

“Dengan demikian, sebagai bangsa yang merdeka, geopolitik dan geostrategi Indonesia sangat diperlukan untuk menyamakan persepsi dari berbagai komponen bangsa di seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional,” kata Agus Widjojo menambahkan. Akan tetapi, mencermati berbagai dampak perkembangan globalisasi, demokratisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi – komunikasi serta berbagai isu-isu regional maupun global, bangsa Indonesia perlu memahami berbagai tantangan yang berpotensi menjadi suatu ancaman terhadap arti sebuah kemerdekaan sejati yang dimiliki bangsa ini.

Kegiatan yang dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo tersebut dihadiri oleh pejabat struktural Lemhannas RI, para Tajar, para Taji, dan Taprof, serta segenap pegawai Lemhannas RI, peserta PPRA XLVII dan PPRA XLVIII.



## Berbagai Lomba Olahraga Ikut Meriahkan Peringatan HUT ke-53 Lemhannas

**L**emhannas RI dalam merayakan hari lahirnya yang ke-53 tahun dengan menggelar beragam lomba olahraga. Setidaknya tiga cabang olahraga yang dilombakan untuk memeriahkan hari ulang tahun lembaga, yaitu pertandingan futsal, bola voli, dan tenis meja. Melalui kegiatan olahraga yang diikuti oleh karyawan diharapkan dapat membentuk sikap sportivitas dan kerjasama yang mencerminkan nilai kejujuran, toleransi dan loyalitas. Berbagai perlombaan olahraga dimulai sejak awal Mei 2018 yaitu pertandingan futsal, voli, tenis meja, juga tarik tambang.



## Bangun Kehangatan antar Pegawai lewat Olahraga Bersama

**S**eluruh personel Lemhannas RI mengikuti senam sehat yang digelar Lemhannas RI sebagai rangkaian acara peringatan HUT ke-53 Lemhannas RI, di Lapangan Tengah Lemhannas (14/5).

Selain pegawai Lemhannas, senam yang dimulai sejak pukul 07.00 WIB ini diikuti oleh para peserta PPRA LVII dan LVIII, Pengurus Perista, dan Pengurus IKAL. Suasana keakraban yang begitu hangat antara pegawai dan peserta pendidikan pun terlihat pada saat senam sehat berlangsung. Tampak begitu semangat dalam mengikuti gerakan-gerakan yang dibawakan oleh tiga orang instruktur senam dari atas panggung. Kegiatan olahraga bersama dilanjutkan dengan pemotongan kue ulang tahun oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dan diberikan langsung kepada para peserta PPRA LVII dan PPRA LVIII.

## Ziarah ke Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata

Sebagai rangkaian dari peringatan HUT ke-53 Lemhannas RI, Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, para pejabat Lemhannas RI, anggota Perista, segenap pegawai Lemhannas RI, serta perwakilan peserta Program Pendidikan Reguler melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata (9/5).

Usai pelaksanaan upacara, yang rutin dilaksanakan jelang peringatan HUT Lemhannas RI, pejabat, anggota Perista, segenap pegawai Lemhannas RI, serta perwakilan peserta Program Pendidikan Reguler melaksanakan tabur bunga ke beberapa makam pahlawan.





### Perista Berbagi Kasih Lewat Bakti Sosial

**P**ersatuan Istri Anggota Lemhannas RI (Perista) mengadakan kegiatan bakti sosial dengan mengunjungi pegawai yang sedang berjuang melawan penyakit (8/5). Ketua Perista Ny. Niniek Agus Widjojo dan Wakil Ketua Perista Ny. Rina Bagus Puruhito, bersama dengan anggota Perista lainnya mengunjungi tiga orang pegawai Lemhannas RI di tiga lokasi berbeda, yakni Edwinanto pegawai Kedepuitan Pendidikan, kemudian istri dari Kapten Riyanto, dan terakhir adalah Sertu Dewi Ratkirani yang saat ini harus rutin melakukan cuci darah.

Pada kesempatan yang berbeda, beberapa personel Lemhannas RI juga telah menyambangi dua orang pegawai yang juga sedang dalam kondisi sakit, yakni Erawati dan Sulisty Langgeng. Dalam rangka memperingati HUT Lemhannas RI, para anggota Perista berharap dapat memberikan semangat bagi pegawai Lemhannas RI yang tengah tertimpa musibah.



### Tingkatkan Kualitas Keimanan Lewat Lomba MTQ

Lomba lainnya yang turut memeriahkan HUT ke-53 Lemhannas RI yaitu lomba Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) yang diikuti oleh perwakilan pegawai Lemhannas RI di lantai 3 Gedung Astagatra Lemhannas RI (7/5). Kegiatan ini digelar untuk menimbulkan syiar Islam di dalam tubuh lembaga, agar setiap nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran serta dapat lebih meningkatkan kecintaan terhadap Al-Quran. Panitia lomba juga berharap dengan diselenggarakannya lomba MTQ ini, potensi pegawai Lemhannas yang mampu membaca Al-Quran dapat tersalurkan dan digali lagi, serta untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan, dan keimanan serta meningkatkan ukuwah islamiyah bagi anggotanya.

Sekitar 20 peserta mengikuti lomba MTQ dengan kategori musabaqoh dan sari tilawah. Penilaian ditekankan pada seni Al Quran, tajwid, dan adabul tilawah. Adapun sebagai juri dalam kegiatan tersebut yaitu Warno Herlianto S.H., H. Saibatul Hamdi, S.Pd.I, Kapten Inf. Abdul Kahar. Sebagai juara MTQ putri yaitu Marina, pemenang kedua Ikcha Maulidya, S.Psi., dan pemenang ketiga Ria Suryani. Sebagai juara MTQ putra yaitu Ruslizar, pemenang kedua Anjar Hidayat, pemenang ketiga Encep Lukmanul Hakim.



## Pegawai Teladan Lemhannas RI

Pemilihan pegawai teladan Lemhannas RI juga turut mewarnai kemeriahan Peringatan HUT ke-53 Lemhannas RI. Perlombaan yang dilaksanakan pada 8 Mei 2018 lalu itu diawali dengan sosiometri (sosiometri adalah alat ukur untuk dapat melihat bagaimana hubungan sosial atau hubungan berteman seseorang) oleh seluruh pegawai Lemhannas RI untuk memilih pegawai yang layak menjadi teladan. Tiga kriteria yang digunakan adalah pegawai Lemhannas RI (ASN/POLRI/TNI), cleaning service, dan anggota satkam. Seleksi selanjutnya yaitu wawancara oleh juri dari perwakilan Lemhannas RI yaitu Drs. Suprianto, Kolonel ARM Raden Djaenudin Slamet, S.E., Kolonel Laut (E) Daru Prajogo, dan Novelia Hadijah, S.E.

Sebagai pemenang yaitu Serka AD Kadimo Saefudin (kategori organik Lemhannas RI), Agus Purnomo (kategori Satkam), Susianto (kategori cleaning service). Pemberian penghargaan sebagai pegawai teladan langsung diberikan oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo selepas kegiatan olahraga bersama (14/5). Diharapkan kepada pegawai yang mendapat predikat teladan dapat menjadi contoh bagi rekan-rekannya dalam mendedikasikan baktinya kepada negara dan bangsa.

## Aksi Donor Darah Warnai HUT ke-53 Lemhannas RI

Lemhannas RI bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) melakukan kegiatan donor darah yang dibuka secara langsung oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo di Ruang Dwiwarna Purwa Gd. Pancagatra Lemhannas RI, (15/5). Kegiatan tersebut diikuti oleh segenap pegawai Lemhannas RI dan para peserta PPRa LVII dan LVIII yang sangat antusias berpartisipasi dalam acara donor darah ini.

“Donor darah yang merupakan kegiatan sosial, sudah tidak asing lagi bagi kita, dengan mendonorkan darah, kita dapat membantu sesama yang sedang sakit atau mengalami kecelakaan dan membutuhkan darah,” ujar Agus Widjojo dalam sambutannya.

Gubernur menambahkan bahwa sudah hakekatnya manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan pertolongan antar sesama manusia, tidak terkecuali dalam hal kebutuhan akan darah. Di samping itu, donor darah memberikan manfaat tidak hanya



bagi penerima donor saja, tetapi juga bermanfaat bagi pendonor yakni dengan tergenerasinya sel-sel darah, lancarnya sirkulasi darah, hingga mencegah terjangkitnya berbagai macam penyakit.

Dalam kesempatan tersebut, Agus Widjojo juga menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada PMI, Unit Transfusi Darah, Panitia penyelenggara, serta para peserta yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah ini, dan berharap dengan terselenggaranya kegiatan ini dapat memberikan manfaat besar bagi siapa saja yang membutuhkan donor darah.



# Kenali Karakter Pemimpin Lewat Permainan Outbound

## Rangkaian Kegiatan PPRA LVIII



Lemhannas RI selalu mampu menorehkan kesan dan pengalaman yang tak terlupakan bagi peserta pendidikan, salah satunya melalui kegiatan edukasi berbasis alam, yakni *outbound training*.

Pendidikan yang diawali dengan metode *off campus* selama satu setengah bulan, dan sebelum melanjutkan pendidikan *on campus* peserta PPRA LVIII ditantang selama tiga hari (7 s/d 9 Mei 2018) untuk menaklukkan berbagai tantangan yang diberikan oleh instruktur *outbound* di Sekolah Polisi Negara (SPN) Lido, Sukabumi, Jawa Barat.

Inti dari kegiatan *outbound* adalah untuk melatih perilaku kepemimpinan dan manajemen di alam terbuka dengan pendekatan yang sederhana. Setelah mengikuti kegiatan *outbound* ini, diharapkan para peserta dapat memperkuat kekompakan dan memantapkan strategi sebelum melanjutkan pembelajaran selama lima setengah bulan di Lemhannas RI.

Para peserta sebagai kader-kader pimpinan tingkat nasional diharapkan dengan mengikuti *outbound* ini dapat memiliki sikap dan perilaku yang dijiwai dengan kecintaan terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta menghayati empat konsensus dasar kebangsaan dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika seperti yang selalu digaung-gaungkan Lemhannas RI.

Disamping itu, *outbound* juga digunakan untuk meningkatkan elemen-elemen dasar dari sebuah pekerjaan, seperti membangun rasa saling percaya, saling memperhatikan, menumbuhkan sikap proaktif dan komunikatif. Kegiatan *outbound* yang dilepas secara langsung oleh Deputy Pendidikan Tingkat Nasional Mayjen TNI Karsiyanto ini diikuti dengan penuh semangat oleh 100 orang peserta PPRA LVIII. Karsiyanto mengatakan, *outbound* ini bertujuan untuk mengenalkan para peserta satu sama lain, karena mungkin masih banyak di antara peserta

yang tidak saling mengenal, dan untuk memperlancar berjalannya komunikasi selama berada di kelas nantinya. Kegiatan ini dirancang untuk memotivasi dan mempersiapkan peserta agar dapat bersikap tegas, efektif, serta memiliki pemahaman untuk mengendalikan emosi dalam bertindak dan mengambil kebijakan yang berdampak bagi orang-orang disekitarnya.

*Outbound* peserta PPRA LVIII diisi dengan sejumlah permainan menaklukkan tantangan di alam terbuka. Para peserta ini diuji untuk menaklukkan sejumlah tantangan seperti merakit perahu menggunakan bambu dan drum dilanjutkan dengan berlomba menyeberangi danau, lalu latihan menembak, serta diberikan beberapa pengarahan tentang bagaimana membangun kerja sama dan komunikasi yang harmonis dengan lebih terfokus pada pembentukan tim, memahami adanya konflik, bermain peran dalam perencanaan, serta cara pengambilan keputusan sebagai *strategic leader*. [AS]



## ***Lemhannas RI Selenggarakan Roundtable Discussion Mengenai Antisipasi Dampak Urbanisasi Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan***

Lemhannas RI adakan *Roundtable Discussion* (RTD) kajian jangka panjang berjudul Antisipasi Dampak Urbanisasi Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan dalam rangka Ketahanan Nasional (8/5). Kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo di Ruang Krishna, Gedung Astagatra, Lemhannas RI. Diskusi menghadirkan empat narasumber yaitu Sonny Harry B. Harmadi (Kepala Lembaga Demografi FEB UI), Kabaharkam Polri Komjen Pol. Drs. Moechgiyanto, S.H., M.Hum. yang diwakili oleh Direktur Kabaharkam Polri, Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemenaker Bambang Satrio Lelono, dan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Ir. Diah Indrajati, M.Sc.

**D**alam paparannya berjudul Kebijakan, Strategi dan Upaya Kemnaker Dalam Meningkatkan Kualitas SDM Pelaku Urbanisasi, Bambang Satrio Lelono mengungkapkan bahwa perpindahan penduduk dari kota kecil ke kota besar atau yang disebut dengan urbanisasi terjadi karena adanya beberapa faktor yaitu untuk mencari pekerjaan, kurangnya infrastruktur fasilitas di kota kecil, dan rendahnya pendapatan. Saat ini, dari 128,06 juta penduduk Indonesia, jelas Bambang, 7,04 juta orang adalah pengangguran. Pengangguran tersebut didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SMK yaitu sebesar 11,41 persen.

Selain itu, Indonesia saat ini juga menghadapi beberapa isu ketenagakerjaan yaitu kualitas/kompetensi calon tenaga kerja/tenaga kerja yang belum sesuai dengan kebutuhan pengguna/industri, penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran, adanya tenaga kerja migran Indonesia, penerapan norma-norma ketenagakerjaan, penerapan hubungan industrial untuk penciptaan iklim usaha yang kondusif, peningkatan kesejahteraan pekerja, serta pengendalian tenaga kerja asing.

Bambang mengatakan, "Untuk meningkatkan kualitas SDM pelaku urbanisasi, Kemenaker memiliki tiga kebijakan yaitu percepatan kompetensi tenaga kerja, percepatan sertifikasi kompetensi, dan akses dan mutu lembaga pelatihan."

Selain kebijakan, Bambang menambahkan, Kemenaker juga memiliki strategi untuk membangun SDM pelaku urbanisasi yang berkompetensi dengan mengadakan pengembangan SDM berbasis kompetensi, meningkatkan profesionalisme SDM, serta meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Strategi tersebut dimaksudkan agar SDM pelaku urbanisasi memiliki daya saing nasional serta internasional.

Bambang juga menjelaskan bahwa terdapat penduduk yang menjadi target utama peningkatan SDM adalah yaitu penduduk yang masih di usia produktif yaitu berkisar dari umur 15 hingga 65 tahun dengan tingkat pendidikan rendah seperti penduduk yang tidak bersekolah, putus sekolah, terpaksa menganggur (PHK, upah tidak sesuai, tidak produktif), keluar dari pasar kerja (ibu rumah tangga, melanjutkan sekolah), dan berganti pekerjaan. Pendudukan yang masuk dalam kelompok tersebut akan diberikan pelatihan agar mejadi tenaga kerja kompeten.

Beberapa program prioritas peningkatan kompetensi dan produktivitas juga telah dipersiapkan oleh Kemnaker seperti pelatihan berbasis kompetensi, peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga kepelatihan, pemagangan dalam dan luar negeri, peningkatan produktivitas, pengembangan BLK komunitas, dan pengembangan desa produktif. Program-program prioritas tersebut, ujar Bambang, diberikan kepada SDM pelaku urbanisasi yang sudah bekerja maupun belum

bekerja agar terus dapat meningkatkan kompetensi, produktivitas, profesionalisme dan daya saing nasional maupun internasional.

Pemapar selanjutnya yaitu Sonny Harry B. Harmadi, Kepala Lembaga Demografi FEB UI menyebutkan bahwa dalam sejarah kehidupan peradaban manusia, untuk pertama kalinya terjadi gelombang urbanisasi terbesar di tahun 2008. "Pada saat itu, lebih dari setengah penduduk dunia tinggal di kota menengah dan kota-kota besar. Menjelang tahun 2030, angka ini diramalkan akan semakin membengkak menjadi hampir 5 milyar jiwa, sebagian besar tinggal di benua Afrika dan Asia. Sementara itu, kota-kota yang berskala mega-city menjadi pusat perhatian publik yang memperlihatkan pertumbuhan kota-kota baru berskala kecil maupun menengah, sebagai respons atas besarnya perubahan yang terjadi, meski dianggap memiliki sedikit sumber daya," kata Sonny.

Menurut United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) (2014), pertumbuhan penduduk perkotaan di negara-negara Asia Pasifik umumnya lebih banyak disebabkan oleh pertambahan alamiah (*natural increase*) yaitu pertumbuhan karena adanya selisih antara jumlah kelahiran dan jumlah kematian. Meski demikian, kecepatan dan ukuran pertumbuhan perkotaan di wilayah ini sangat bervariasi antarwilayah. Langkah yang paling efektif untuk memperlambat laju pertumbuhan penduduk perkotaan tersebut ialah menurunkan angka kelahiran yang tidak dikehendaki baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Menurunkan angka kemiskinan, pemberdayaan perempuan, dan penyediaan layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas merupakan faktor-faktor yang dapat memengaruhi penurunan angka kelahiran tersebut.

Sonny menambahkan bahwa dari data yang ada di belahan berbagai dunia, angka kelahiran lebih rendah di daerah perkotaan daripada perdesaan. "Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa banyak penduduk yang tinggal di daerah perkotaan merupakan kelompok muda (usia produktif) yang memiliki potensi untuk bertumbuh terus," kata Sonny. Kurangnya akses penduduk perempuan terhadap informasi, layanan kesehatan reproduksi atau kontrasepsi berakibat pada angka kelahiran yang lebih tinggi.

Selain angka kelahiran, komponen demografi yang memiliki kontribusi signifikan terhadap angka urbanisasi adalah migrasi, sebagai reaksi sikap manusia atas persoalan-persoalan yang muncul di daerah asal seperti masalah sosial maupun kesempatan ekonomi. Degradasi lingkungan dan konflik sosial bisa jadi mengakibatkan perpindahan penduduk menuju daerah-daerah yang dianggap dapat memberikan harapan perbaikan kehidupan dan peningkatan status sosial ekonomi. Namun tidak jarang, di antara migran yang meninggalkan daerah asal tersebut tidak memiliki pilihan untuk tinggal di daerah-daerah yang tidak layak huni (daerah kumuh perkotaan), kurangnya akses terhadap perumahan dan sanitasi yang layak, serta aksesibilitas terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan yang pada gilirannya berdampak pada kemiskinan perkotaan.

Diskusi tersebut kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Baharkam POLRI yang mengangkat tema "Kebijakan, Strategi, dan Upaya POLRI dalam Menghadapi Dampak Negatif

Urbanisasi terhadap Kamtibmas". Keamanan merupakan faktor yang penting karena dengan adanya keamanan yang mantap dan kondusif, dapat memicu menggali dunia usaha melalui datangnya investasi yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Hal tersebut akan mendorong berjalannya pembangunan nasional dan tercapainya kesejahteraan rakyat.

Urbanisasi, menurut Baharkam POLRI, memiliki efek yang negatif terhadap Kamtibmas di desa yang ditinggalkan maupun di kota yang dituju. Efek negatif bagi desa yang ditinggalkan adalah kekurangan tenaga kerja, perilaku yang tidak sesuai dengan norma setempat, hilangnya penduduk yang berkualitas, kesulitan dalam mencari tenaga terdidik sebagai tenaga penggerak pembangunan dan terhambatnya pemangunan di desa.

Ir. Diah Indrajati, M.Sc., dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menyebutkan bahwa pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Perkembangan jumlah desa di Indonesia meningkat pesat, dari 72.944 pada tahun 2012 menjadi 74.093 pada tahun 2014. "Jumlah desa di Indonesia meningkat pesat, sayangnya tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keterisolasian wilayah karena keterbatasan akses, baik transportasi, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, maupun permukiman, terutama di desa-desa di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, dan pulau-pulau kecil terluar, menjadi penyebab tingginya tingkat kemiskinan di desa," kata Diah Indrajati.

Diah menambahkan, ada tiga hal utama yang menjadi arah kebijakan dan strategi pembangunan desa dari Kementerian Dalam Negeri. Pertama, pemenuhan strategi pelayanan minimum desa sesuai dengan kondisi geografis desa. Kedua, penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa. Ketiga, pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa.

Di akhir diskusi disimpulkan bahwa berkenaan dengan pembangunan nasional pada umumnya, adalah penting untuk mencegah terjadinya bias perkotaan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan-kebijakan Pemerintah yang menjadi implementasi rencana pembangunan itu.

Selain itu, terkait dengan bonus demografi yang mulai terjadi sejak 2012, sebenarnya ada ketimpangan antar wilayah dalam hal struktur penduduk menurut umur. Daerah perkotaan dan kota cenderung didominasi penduduk usia produktif, sebaliknya perdesaan masih memiliki rasio ketergantungan yang tinggi. Dampaknya, kota dan perkotaan cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi karena ditopang penduduk usia produktif yang besar. Hal ini akan menimbulkan ketimpangan pendapatan desa-kota yang semakin buruk, sehingga mendorong migrasi penduduk desa ke kota. Oleh karenanya dibutuhkan kebijakan pengarah mobilitas penduduk yang tepat, serta mempertahankan penduduk usia produktif agar tetap bekerja di desa. Tentu upaya ini harus dibarengi dengan kebijakan pembangunan wilayah perdesaan yang tepat.

# Romo Magnis, Sisi Lain Pancasila sebagai Ideologi

“Pancasila dapat disebut sebagai ideologi karena merupakan cita-cita kemanusiaan yang diyakini dan dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia,” kata Prof. Dr. Franz Magnis Suseno pada saat mengisi kuliah di hadapan peserta PPRA LVII di ruang NKRI Gedung Pancagatra Lemhannas RI (22/5).

**P**ria yang akrab dipanggil Romo Magnis tersebut menyampaikan bahwa Ideologi sebagai satu dari delapan gatra yang selalu menjadi rujukan Lemhannas RI dalam melakukan kajian terkait sejauh mana ketahanan ideologi bangsa Indonesia dari waktu ke waktu. Seiring dengan dinamika perkembangan jaman, Indonesia dihadapkan pada berbagai macam ideologi, meski demikian bangsa Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga saat ini tetap berpegang teguh pada ideologi Pancasila.

Ideologi merupakan suatu pemikiran tentang bagaimana manusia harus bertindak. Istilah ideologi untuk pertama kali dirumuskan oleh seorang ahli ilmu sosial Prancis di pertengahan abad 19. Namun menurut Romo Magnis, yang secara penting mempopulerkan istilah ideologi adalah Karl Marx, yang dalam teorinya mengatakan bahwa ideologi sebagai cara manusia berpikir pada dasarnya ditentukan oleh pola teori cita-cita yang pada hakekatnya untuk menunjang kekuasaan.

## Pandangan Karl Marx atas Golongan Masyarakat

Marx secara sederhana membagi masyarakat ke dalam dua golongan yakni masyarakat kelas atas dan kelas bawah.

“Yang atas berkuasa, yang bawah bekerja, di atas bidang ekonomi ada politik. Jadi bagi Marx ideologi adalah cara manusia berpikir menilai agama pandangan moral, budaya, estetis, dan mendukung semua yang berkuasa,” kata Romo Magnis menjelaskan.

Romo Magnis menyebutkan bahwa arti ideologi terbagi ke dalam tiga teori, yakni ideologi sebagai sebuah kesadaran palsu menurut teori dari Karl Marx, dimana sebagian besar orang-orang yang beragama, menolak agama disebut sebagai ideologi. Karena ideologi dianggap memiliki stigma negatif. “Orang merasa dihina atau dicurigai kalau disebut ideolog. Karena ideologi berarti teori yang tidak berorientasi pada kebenaran, melainkan digunakan oleh kelompok berkuasa untuk melegitimasi kekuasaannya,” tuturnya.

Konsep kedua yang diutarakan Romo Magnis terkait makna ideologi yakni ideologi yang bersifat netral. Dalam sudut pandang ini pula ideologi dianggap sebagai kecemburuan sistem berpikir, pandangan dunia, nilai-nilai dasar, dan sikap-sikap dasar rohani sebuah kelompok sosial atau budaya. Ideologi dalam arti netral juga mempunyai nada negatif karena melalui ideologi ini menjadi dasar dalam melakukan suatu tindakan/perbuatan.

“Ideologi ini tidak dapat dimodifikasi berdasarkan pengalaman, karena orang yang berpikir secara ideologis



“Pancasila dapat disebut sebagai ideologi karena merupakan cita-cita kemanusiaan yang diyakini dan dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia”

-Prof. Dr. Franz Magnis Suseno

tidak dapat dipengaruhi oleh argumentasi-argumentasi, serta tidak boleh dipertanyakan dari sudut etika (Marxisme-Leninisme),”kata Romo Magnis. Kemudian konsep yang ketiga kedalam tiga macam ideologi, yakni ideologi klasik yang di antaranya terdiri atas liberalisme, kapitalisme, sosialisme, anarkisme, nasionalisme dan fasisme. Selanjutnya terdapat cita-cita non ideologis, termasuk di dalamnya ideologi terbuka, dan yang terakhir ideologi dan cita-cita politik pasca Perang Dunia ke-2.

Di samping adanya Pancasila, kebangsaan juga menjadi unsur terpenting karena sejak 17 tahun sebelum bangsa ini merdeka, rakyat sudah dipersatukan di atas kemajemukan agama, etnis, budaya oleh para pemuda yang dikenal dengan peristiwa Sumpah Pemuda.

Dia menegaskan bahwa kekuatan Pancasila pada dasarnya ialah orang-orang yang berbeda dari suku, daerah, maupun agama mengakui bahwa seluruhnya adalah orang Indonesia dan memberikan persatuan pada kebangsaan. Kebangsaan atau nasionalisme dianggap suatu sikap hati, perasaan bersama, padahal tidak saling mengenal satu sama lain.

Indonesia sangat majemuk, yang khas dari kebangsaan nasionalisme adalah kita merasa bersama padahal tidak saling kenal. Jadi nasionalisme kuat sekali dalam memperjuangkan kemerdekaan,” ujar Romo Magnis. Romo Magnis juga menyoroti kejadian teror bom yang baru-baru saja terjadi pada awal Mei lalu di tiga Gereja di Surabaya, yakni ketika satu keluarga pelaku serangan bom

### Pancasila Sebagai Kekuatan Bangsa

Romo Magnis menambahkan bahwa Pancasila perlu dilihat dari dua sisi, dari sisi kelima silanya dan dari segi fungsi. Lima sila Pancasila merupakan nilai, cita-cita, dan etika politik Indonesia, sedangkan fungsi Pancasila itu jauh lebih penting, dimana untuk pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno dan diterima oleh PPKI, dengan maksud untuk menunjukkan bahwa Indonesia milik semua.

“Sekitar tahun 1980-an, penggunaan kata Pancasila sebagai ideologi terbuka mulai diperdengarkan, dimana kata terbuka bermakna tidak tertutup, bersifat luwes, dan tidak membatasi orang untuk berpikir. Ideologi terbuka dianggap sebagai suatu sistem nilai dan cita-cita yang tidak ideologis karena tidak berasal dari pemikiran manusia melainkan suatu nilai yang hidup di dalam masyarakat,” kata Romo Magnis.



terbukti menjadi bunuh diri.

“Pemikiran ideologis, kalau saya lihat foto satu keluarga yang terlihat tenang dan gembira mau masuk surga dengan cara membunuh orang-orang yang tidak bersalah, itu suatu pemikiran ekstrem. Sepertinya ada sesuatu yang sangat miring di dalam mental mereka, itu sebagai suatu pemikiran ideologi,” ujar budayawan berusia 82 tahun itu. Peristiwa tersebut mengganggu stabilitas ketahanan ideologi bangsa Indonesia, dan menurutnya Pancasila akan terancam apabila nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip ideologi Indonesia tersebut tidak diimplementasikan.[AS]

# Lemhannas RI Penuhi Undangan CIISS ke China



Sebagai institusi pemikir (*think tank*) Pemerintah RI, Lemhannas RI berkewajiban terus melakukan pembangunan kapasitas (*capacity building*) untuk meningkatkan kinerja terutama dalam bidang pengembangan pendidikan tingkat nasional yang menjadi *core business* Lemhannas RI. Berkaitan dengan pengembangan kapasitas tersebut Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo didampingi oleh Sekretaris Utama Komjen Pol Drs. Arif Wachyunadi melakukan lawatan ke negeri tirai bambu China selama delapan hari (27 Maret – 3 April 2018) beserta beberapa orang Taprof dan Pejabat Lemhannas RI.

Lawatannya kali ini dalam rangka memenuhi undangan dari China Institute for International Strategic Studies (CIISS). Pada kesempatan itu, dimanfaatkan untuk mempererat kerja sama antar kedua institusi, dimana dilakukan diskusi terkait beberapa isu strategis yang sedang berkembang, baik dalam lingkup regional (China – ASEAN), maupun lingkup global (China – Internasional).

Tantangan baru yang dihadapi China dan negara-negara ASEAN pada era milenial meliputi masalah ekonomi, pertahanan, energi, keamanan siber, perubahan iklim, ketersediaan air, dan penggunaan sosial media. Selain itu pertemuan tersebut dalam rangka merancang sebuah platform kerja sama dalam hal pertukaran dosen pengajar maupun pelajar, pembuatan kajian-kajian strategis, penyelenggaraan seminar dan lainnya.

CIISS merupakan lembaga riset sipil namun dengan latar belakang militer yang cukup kuat, dimana terdapat lebih dari 100 peneliti dengan latar belakang militer, berbagai ahli sesuai kompetensi, mantan duta besar, dan lain sebagainya. Keberadaannya cukup memiliki peran

penting dalam hal kontribusi pemikiran-pemikirannya untuk pemerintah China khususnya, dan dunia pendidikan.

Agus Widjojo menyambut baik keinginan CIISS untuk menjalin kerja sama dengan Lemhannas RI. Kerja sama strategis yang telah terjalin antara China dan Indonesia seputar pengembangan ekonomi yang meliputi infrastruktur dan industri, pertahanan, energi dan perubahan iklim. Dinamika perubahan dunia baru juga berdampak pada kedua negara, seperti meningkatnya ketegangan geopolitik antara kekuatan-kekuatan utama dunia, memudarnya nilai dan kepemimpinan barat, melemahnya institusi-institusi internasional, peran hukum berada dalam ancaman, meningkatnya politik identitas dan nasionalisme serta menurunnya rata-rata pertumbuhan khususnya pada negara berkembang. Oleh karenanya disampaikan pula pada kesempatan diskusi bersama dengan Mayor Jenderal (Purn) Gong Xianfu, Wakil Ketua CIISS, beberapa hal yang menjadi prioritas Pemerintah RI yakni seputar keamanan dan stabilitas dunia, mitigasi konflik regional, meningkatkan perdagangan, turisme dan investasi, mengatasi tantangan-tantangan global, dan melindungi WNI di luar negeri.



Kunjungan kerja Gubernur ke China tidak berhenti pada CIISS saja, namun juga berkunjung ke beberapa perusahaan maupun instansi strategis lainnya seperti China Electronic Technology Corporation (CETC), Kuasa Usaha Ad-Interim (KUAI) di Kedubes RI, China Aerospace Long-March International (ALIT), Tsinghua University, China North Industry Group Corporation (NORINCO), serta di dua hari terakhir berada di China menyempatkan untuk mengunjungi lokasi-lokasi yang menjadi ikon wisata negeri tirai bambu tersebut. Di antaranya Olympic Stadium, Lapangan Tiananmen, Forbidden City, Shanghai Pearl Tower, dan Exhibition Hall.

#### **China Electronic Technology Corporation (CETC)**

Pada tanggal 30 Maret 2018, Gubernur beserta rombongan berkunjung ke CETC, yakni perusahaan teknologi milik negara berskala besar yang menjadi tulang punggung di China, mencakup semua bidang informasi elektronik. Kekuatan CETC berada pada bidang perusahaan elektronik, keamanan elektronik dan informasi dengan pasar yang mencakup lebih dari 110 negara di dunia.

Elektronik pertahanan telah membentuk tujuh sistem produk utama yaitu peringatan dini berbasis udara, sistem informasi elektronik terpadu, radar, komunikasi dan navigasi, peperangan elektronika, peralatan elektronik untuk *Unmanned Aerial Vehicle (UAV)* dan *Identification Friend or Foe (IFF)* terpadu. Sedangkan pada bidang keamanan elektronik dan informasi terutama mencakup keamanan *e-government*, transportasi cerdas, energi baru, komponen, produk dan bisnis lainnya.

#### **China Aerospace Long-March International Trade (ALIT)**

Masih di hari yang sama, perjalanan dilanjutkan dengan melakukan kunjungan ke salah satu perusahaan produk, dan layanan kelas dunia yang khusus mengekspor dan impor peralatan dan teknologi yang terkait kedirgantaraan

di China. ALIT menyediakan serangkaian produk dan teknologi pertahanan seperti sistem persenjataan rudal, beberapa sistem peluncuran roket (MLRS), teknologi mesin roket, bom panduan presisi (PGB) dan kendaraan udara tanpa awak (UAV). ALIT juga berkomitmen pada ekspor peralatan, teknologi dan layanan keamanan, anti-teror, anti-kerusakan, bantuan bencana dan mitigasi. ALIT menjunjung tinggi perdamaian dunia, mencari perkembangan yang harmonis dan mengejar hasil win-win.

#### **Tsinghua University**

Delegasi Lemhannas RI pada kesempatan kunjungan ke Beijing juga melakukan pertemuan dengan Tsinghua University. Pada pertemuan tersebut terjadi pertukaran informasi akademik antara kedua institusi yang dijadikan dasar dalam pembangunan kerja sama pada waktu yang akan datang. Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan dari *United in Diversity (UID)*. UID sendiri merupakan organisasi yang memfasilitasi para pemimpin untuk menciptakan dan menerapkan solusi berkelanjutan untuk tantangan terbesar di kawasan.

#### **China North Industry Group Corporation (NORINCO)**

NORINCO juga menjadi salah satu badan penelitian di China yang tak luput untuk disambangi oleh Gubernur beserta delegasi Lemhannas lainnya. NORINCO adalah badan utama untuk penelitian dan pengembangan senjata dan peralatan pasukan darat serta kekuatan tulang punggung untuk penelitian dan pengembangan peralatan militer melalui inovasi, meningkatkan kualitas pembangunan, serta ikut bertanggung jawab sosial adalah merupakan tiga tugas utamanya. Pada akhir tahun 2016, total aset NORINCO GROUP hampir mencapai 369.295 miliar yuan, sementara karyawan yang dimiliki berjumlah 253.000 orang.



## Mensesneg Beri Ceramah Mengenai Sistem Manajemen Nasional dan Revolusi Industri 4.0 Kepada Peserta PPRA LVIII

Di hadapan para peserta PPRA LVIII, Menteri Sekretaris Negara RI, Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc. memaparkan pentingnya kesiapan diri menyongsong Revolusi Industri 4.0 yang sudah ada di depan mata. Ia memberikan ceramah berjudul "Sistem Manajemen Nasional dalam Penyelenggaraan Pemerintahan" kepada peserta PPRA LVIII di Ruang Bhnneka Tunggal Ika Gedung Pancagatra Timur Lt. 3 Lemhannas RI (24/5).

**M**engawali ceramahnya, Pratikno mengutip Lord Emerich Edward Dalberg "All power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely" yang diartikan semua kekuasaan cenderung melakukan korupsi dan kekuasaan absolut sudah pasti korup. Perubahan sistem manajemen nasional dilakukan di Indonesia selama empat kali, pada amandemen pertama yaitu 19 Oktober 1999, amandemen kedua yaitu 18 Agustus 2000, amandemen ketiga yaitu 10 November 2001, dan yang keempat yaitu 10 Agustus 2002.

Sebelum reformasi 1998, pembagian kekuasaan (dispersi kekuasaan) ketatanegaraan pusat

terdiri lembaga tertinggi negara yaitu MPR RI, membawahi lembaga tinggi negara (DPR RI, DPA RI, Presiden RI, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan RI). Saat ini, lembaga tertinggi negara dihapus dan diganti menjadi lembaga tinggi negara.

Dalam hal pembagian kekuasaan internal pemerintah pusat dan daerah, Indonesia sebelum reformasi 1998 menempatkan kekuasaan pemerintahan secara terpusat (tersentralisasi), sementara pasca reformasi 1998, tiap daerah diberikan kewenangan untuk mengelola kekayaan daerah (dilakukan secara desentralisasi).

Dalam hal kebebasan politik, sebelum 1998, kebebasan berpendapat dan berpolitik baik di publik maupun di media massa sangat dibatasi, sementara itu pasca reformasi 1998 hingga saat ini, kebebasan berpendapat dan berpolitik dilakukan dengan sebebas-bebasnya. Akan tetapi, kebebasan tersebut seringkali tidak diikuti oleh rasa tanggung jawab, sehingga menghasilkan pemberitaan yang tidak berimbang, bahkan seringkali muncul hoax di masyarakat umum.

"Kebebasan politik saat ini juga didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi, secara positif teknologi dapat menghasilkan berita yang *up to date* dan berpengaruh terhadap





besarnya peran opini publik terhadap keputusan pemerintah,” kata Pratikno. Selain itu, Pratikno juga menyebutkan bahwa kebebasan politik yang tidak bertanggung jawab dan perkembangan teknologi juga memiliki pengaruh terhadap berkembangnya informasi yang negatif di Indonesia. “Kebebasan politik yang ditopang dengan pesatnya pertumbuhan teknologi, mempengaruhi munculnya *hoax* dan *fake news* (berita bohong), antara lain disebabkan karena tidak adanya redaktur berita dan terbatasnya kontrol pemerintah,” kata Pratikno melanjutkan. Pratikno memberikan contoh dengan meningkatnya ujaran kebencian di media sosial dan penghinaan terhadap simbol-simbol negara.

Terkait dengan pesatnya perkembangan teknologi terkini, Pratikno mengajak kepada seluruh peserta agar mampu mengadaptasi perkembangan tersebut melalui pemahaman atas Revolusi Industri 4.0. Ia menjelaskan jika dibandingkan dengan revolusi industri satu, dua dan tiga, ternyata itu begitu lambat sampai ke masyarakat. Namun dengan revolusi industri 4.0, hal itu begitu cepat karena didukung digitalisasi dan teknologi.

Dalam materinya, Pratikno menekankan betul kemajuan-kemajuan yang mau tidak mau sudah tersaji dalam Revolusi Industri 4.0. “Karenanya, penting memiliki kemampuan mengelola inovasi-inovasi yang sudah mulai muncul dalam berbagai aspek

kehidupan manusia,” kata Pratikno. “Ada kemanfaatan, tapi ada risiko yang harus dikelola,” ujar mantan Rektor UGM tersebut. Untuk itu, ia menekankan selalu ada dua sisi yang muncul dari setiap inovasi-inovasi yang lahir dari berbagai aspek kehidupan manusia. Karenanya, Pratikno menegaskan, mempelajari teknik meliputi pula isu etik, isu tanggung jawab dan isu moral. “Penting untuk kita agar mampu mengoptimalkan seluruh teknologi serta pemangku kepentingan dengan kerja sederhana,” kata Pratikno melanjutkan.

Terkait dengan revolusi industri 4.0, kata dia, pemerintah memiliki kekhawatiran tersendiri, yakni jika masyarakat justru mengaku hal itu sesuatu yang biasa dan bahkan tidak sampai ikut khawatir. Di akhir kesempatan, ia menekankan agar para peserta PPRA LVIII sebagai calon pimpinan masa depan Indonesia dapat mengoptimalkan revolusi industri 4.0 ini. “Banyak contoh namun yang ingin saya katakan, revolusi industri 4.0 ini paling memberikan efek begitu besar dan mampu memporandakan. Sebab melalui teknologi digitalisasi data analitik, itu bisa mengoptimalkan seluruh teknologi atau ‘stakeholder’ yang ada dengan sederhana,” katanya.

***“Penting untuk kita agar mampu mengoptimalkan seluruh teknologi serta pemangku kepentingan dengan kerja sederhana”***

*- Menteri Sekretaris Negara RI, Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc.*



## Menristekdikti : Tantangan Indonesia dalam Daya Saing Global

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan bahwa daya saing global (*Global Competitiveness*) menjadi tantangan mendasar bangsa Indonesia ke depan, karena berdasarkan Indeks Daya Saing kita dibandingkan dengan negara tetangga masih tergolong rendah terutama dalam bidang inovasi dan teknologi. Pada tahun 2017, Indonesia berada pada posisi ke 36 dari 137 negara, yang tercatat dalam *World Economic Forum* tentang *Global Competitiveness*.

**I**ndonesia saat ini berada pada peringkat ke 87 dari 127 negara di dunia yang menghasilkan inovasi. Sementara itu pada tingkat indeks teknologi, berada pada posisi ke 80 dari 137 negara. "Kalau kita lihat daya saingnya 36, lalu inovasinya yang bisa menghasilkan ekonomi kita masuk di 87, dan kesiapan secara teknologi semua inovasi-inovasi itu hanya masuk di angka 80 dari 127 negara," ujar Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, pada saat memberikan ceramah kepada para peserta PPRA LVII di ruang NKRI (17/5).

Indonesia akan menghadapi tantangan yang cukup berat di tahun 2021, yaitu transformasi dari negara berpendapatan menengah, menjadi negara maju dengan pendapatan tinggi. Kesenjangan sosial dan masih adanya batas antara miskin dan kaya menjadi masalah tersendiri, terlebih pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dirasa minim untuk menuju negara maju.

Pemerintah, dalam hal ini, Kemenristekdikti berupaya memajukan daya saing global dengan meningkatkan

kualitas sumber daya, salah satunya melalui pendidikan tinggi, sains dan teknologi. "Berikutnya bagaimana masalah pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu Indonesia yang mampu menghadapi tantangan globalisasi dan ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan," kata Mohamad Nasir. Peningkatan akses, relevansi dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa terus diberlakukan.

Sebuah penelitian yang dikembangkan oleh Pricewaterhouse Coopers (PwC) meramalkan Indonesia di tahun 2050 akan menepati peringkat ke empat dengan *Gross Domestic Product (GDP)* tertinggi di dunia atau menjadi negara dengan perekonomian terbesar nomor 4 di dunia, setelah China, Amerika Serikat, dan India. Namun jika melihat kesiapan dari daya saing kita yang tergolong rendah maka timbul pertanyaan, mungkinkah Indonesia mampu melangkah sejauh itu untuk menjadi negara maju.

Menurut M. Nasir, penyebab paling dominan dari rendahnya daya saing Indonesia disebabkan oleh tiga faktor,



pertama pekerjaan, pendidikan dan pelatihan, yakni masalah mutu pendidikan tinggi, pendidikan pelatihan atau pendidikan vokasi. Sesuai mandat dari Presiden Jokowi yang memerintahkan agar pendidikan vokasi dan politeknik ditingkatkan dalam rangka mempersiapkan SDM yang berkualitas.

"Pendidikan kita kalau ditelisik lebih dalam, angka partisipasi kasar (APK) di 2018 Indonesia di angka 33 persen. Artinya angka partisipasi kasar usia 18 sampai 23 yang menempuh pendidikan tinggi baru sebesar 33 persen. Itu akan menyebabkan daya saing kita rendah," ujar M.Nasir.

Faktor selanjutnya terkait jumlah pendidikan tinggi di Indonesia yang mencapai 4.579 fasilitas pendidikan, namun yang menjadi permasalahan utama ada pada sains dan teknologinya masih tergolong rendah. "Padahal saya sudah mensyaratkan setiap pendidikan universitas terdiri atas 60 persen sains dan teknologi, dan 40 persen sosial. Akan tetapi, kenyataannya ilmu sosial mendominasi di negeri ini," ujarnya.

Faktor penghambat yang selanjutnya adalah masalah inovasi dan kesiapan teknologi. M.Nasir menyampaikan kepada peserta PPR LVII, bahwa pada saat pertama kali Ia menjabat sebagai menteri, jumlah jurnal publikasi internasional yang dikeluarkan oleh para peneliti di Indonesia juga masih terbelah rendah dan sangat sedikit jika dibandingkan dengan negara tetangga.

Jumlah publikasi ilmiah internasional merupakan salah satu indikator penilaian reputasi bidang

pendidikan suatu bangsa. Nemun demikian, jumlah publikasi ilmiah Indonesia terindeks Scopus per 6 April 2018 berhasil melampaui Singapura dan Thailand, dengan jumlah sebanyak 5.125, sementara Singapura 4.948 dan Thailand sebanyak 3.741, dan Malaysia tetap unggul dengan 5.999.

Bicara soal daya saing global, tak terlepas dari Revolusi Industri 4.0 dimana perubahan peradaban dunia ini sudah tiba di Indonesia. Mohamad Nasir bersama dengan Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo terlibat sebagai sektor pemimpin pemerintah dalam mengembangkan Revolusi Industri 4.0 di Indonesia untuk seluruh Kementerian/Lembaga. Revolusi Industri 4.0 ini merupakan era disrupsi teknologi gabungan antara domain fisik, digital dan biologi. Perubahan peradaban ini sudah tidak lagi mengenal bahan baku, layaknya generasi pertama (industri uap), kedua (otomotif), dan ketiga (otomatisasi), pada era ini sistem robot sudah mulai berkembang dimana semua komponen dikontrol oleh komputer. "Revolusi Industri ini bahannya sudah tidak ada lagi, kita sebut yang populer di antaranya *cyber physical system* (sistem fisik siber), *e-busines*, *e-commerce* sebagai contoh Gojek," jelasnya.

Revolusi Industri 4.0 meliputi di antaranya *Internet of Things*, *Artificial Intelligence*, *New Materials*, *Big Data*, *Robotics*, *Augmented Reality*, *Cloud Computing*, *Additive Manufacturing*, *3D Printing*, *Nanotech* and *Biotech*, *Genetic Editing*. Indonesia perlu

mempersiapkan sumber dayanya dengan meningkatkan keterampilan tenaga kerja dengan teknologi digital, karena dimungkinkan akan terjadi pergeseran profesi, dimana sekitar 75 sampai dengan 375 juta tenaga kerja yang beralih profesi.

M.Nasir menantang kesiapan para peserta PPR LVII sebagai kader pimpinan tingkat nasional dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0. Menurutnya di era ini seorang pemimpin tidak hanya cukup dengan menguasai literasi lama (membaca, menulis, dan matematika) sebagai modal dasar untuk berkiperah di masyarakat. "Seorang pemimpin perlu memiliki tiga literasi baru yang harus dimiliki oleh masing-masing individu, pertama yakni literasi data, kemampuan untuk membaca analisis, dan menggunakan informasi (Big Data) di dunia digital, kedua literasi teknologi dengan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (*Coding*, *Artificial Intelligence*, *Engineering*, *Principles*, dan *Cyber-Security*), Bioteknologi, dan yang terakhir literasi manusia yang meliputi kemanusiaan, komunikasi, kreativitas dan desain," kata M. Nasir. [AS]

**"Seorang pemimpin perlu memiliki tiga literasi baru yaitu literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia"**

– Mohammad Nasir, Menristekdikti



## Dewan Analisis Strategis BIN Letjen TNI (Purn) Muhammad Munir Beri Kuliah Mengenai Ancaman Kritis Nir Militer Hingga 2025

**S**eiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, dinamika berbagai ancaman menjadi begitu multi dimensi, baik ancaman yang bersifat militer, maupun nir militer. Sebuah ancaman dikatakan sebagai ancaman militer apabila musuh pada saat melakukan aksinya menggunakan strategi teknik dan taktik secara militeristik, meskipun ancaman militer saat ini semakin maju dengan didukung oleh teknologi.

“Serangan yang diluncurkan kini tak lagi secara linear, namun bisa juga secara vertikal,” demikian yang disampaikan oleh Dewan Analisis Strategis Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn) Muhammad Munir pada saat berbagi strategi dalam menganalisis ancaman militer dan nir militer kepada para peserta PPRA LVII di ruang NKRI Gedung Trigatra Lemhannas RI (3/5).

“Mesin perang darat, laut, dan udara tidak lagi sesuai dengan teknik dan taktik yang kita pelajari dulu, tidak secara linear, bisa saja secara vertikal. *Center of gravity* yang dijadikan sasaran, bisa saja dihancurkan dulu,” ujar Munir. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh BIN terkait

potensi ancaman yang kemungkinan terjadi di Indonesia dalam waktu dekat masih sangat kecil, begitu pula untuk jangka waktu menengah dan jangka panjang hingga sepuluh tahun keatas, yang hingga kini belum terlihat.

“Kita memang tidak mampu memprediksi tapi berdasarkan indikator yang kita amati, masih belum terlihat, tetapi bukan berarti ancaman militer itu tidak ada,” jelasnya. Sedangkan ancaman yang dapat dikatakan sebagai ancaman nir militer meliputi delapan gatra yang selalu dijadikan indikator oleh Lemhannas RI dalam mengukur ketahanan nasional.



Sebagai contoh pada era pasca perang dingin dimana dunia dibagi menjadi dua blok ideologi, sosialis komunis dan liberal patrialis. Indonesia tetap teguh dengan ideologi Pancasila dan sistem politik demokratisnya. "Indonesia bersyukur selalu berselancar di tengah-tengah itu dengan ideologi Pancasila dan politik demokratis, kita akan bergaul dengan negara mana saja asalkan kepentingan negara kita tetap diutamakan," jelasnya.

Beberapa faktor strategis yang dianggap berpengaruh kuat terhadap masa depan bangsa Indonesia seperti pada sektor demografi dimana Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030, yakni suatu kondisi negara dimana penduduknya mayoritas berada pada usia produktif.

Di samping itu peran partai politik dalam menciptakan kader-kader politik yang berkualitas, generasi millennial yang cenderung bersifat malas mulai mengisi partai-partai politik, dan berakibat menghasilkan kader partai yang kurang mumpuni.

"Ada satu kondisi dari aspek psikologis, generasi millennial cenderung malas-malasan karena lahir sudah menghadapi kondisi yang enak, ini yang membahayakan sehingga dari pencermatan kita sifat nasionalismenya, mereka kader partai yang kurang mempuni,

sementara kader partai yang lama belum juga settle, kemudian muncul kader millennial," ujar Munir. Selain itu tingginya angka kemiskinan, ketergantungan investasi asing, eksploitasi SDA, radikalisme dan terorisme, dinamika kawasan Asia-Pasifik serta teknologi dan informasi hanya sebgaiian kecil dari sekian banyak faktor yang oleh BIN dianggap berpengaruh dalam menentukan masa depan Indonesia. "Ini faktor-faktor yang kita cermati, nilai paling dominan yang akan mempengaruhi ketahanan nasional, padahal sesungguhnya banyak dan tidak terhingga," kata Munir.

Munir memaparkan pula sejumlah isu strategis dalam lingkup global, regional, dan nasional kepada peserta PPRA LVII dalam kesempatan tersebut. Dimana isu global meningkatkan ketidakpastian perekonomian dan kondisi politik antar negara, seperti efek terpilihnya Donald Trump, Konflik Suriah, Imigran di Eropa, Nuklir di Korea Utara hingga gerakan ISIS. Sedangkan isu regional seperti kebangkitan China sebagai kekuatan baru dunia, konflik klaim China atas sebagian besar Laut China Selatan, posisi Indonesia dalam ASEAN dan tekanan Melanesian Sparehead Group (MSG) terkait Papua.

Sedangkan isu nasional yang berpotensi menjadi ancaman kritis untuk periode 2018 hingga 2025

adalah Pilpres 2019 mendatang, akan banyak kelompok-kelompok yang mengusung jargon-jargon yang bersifat politik identitas. Sejauh tidak ditanggapi oleh kepentingan dari luar Indonesia, akan masih bisa terukur rasio ancamannya, namun apabila sebaliknya maka berpotensi menjadi ancaman yang paling kritis.

Begitu pula dengan terorisme, berkembangannya radikalisme di dalam negeri mempermudah jaringan teroris berkembang di Indonesia, ditambah kemudahan pendanaan gerakan terorisme dengan adanya perkembangan teknologi. "Kita jangan sampai lengah terhadap isu nasional, radikalisme, terorisme dan separatisme, karena isu tersebut merupakan bahaya laten, berada di bawah permukaan tapi tidak mati, tidak diam mereka selalu bergerak dan berkembang," tegasnya. [AS]

*"Indonesia akan bergaul dengan negara mana saja asalkan kepentingan negara kita tetap diutamakan"*

*-Dewan Analis Strategis Badan Intelijen Negara (BIN)  
Letjen TNI (Purn) Muhammad Munir*



## Kepala Biro Humas Settago Kunjungi MNC Media Group, LPP RRI, dan LPP TVRI

Kepala Biro Humas Settago Lemhannas RI beserta jajaran Biro Humas Brigjen TNI Mindarto mengunjungi MNC Media Group (17/5), ke LPP RRI dan LPP TVRI (23/5). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kerja sama antara Lemhannas RI dan media massa nasional.

Pada pertemuan dengan MNC Media Group, Kepala Biro Humas didampingi oleh Kabag Protbok Kolonel Laut (P) Eddy Tarjono, Kasubbag Protokol Letkol Inf M. Isdar, Kasubbag Dokumentasi Letkol Inf Adlansyah M., dan Kasubbag Hubanlem Endah Heliana. Karo Humas dan jajarannya berdiskusi dengan jajaran redaksi MNC Media Group, yakni Arya M. Sinulingga (Pemimpin Redaksi MNC Group), Rizal Yussac (Chief Editor MNC TV), Nicolaus Uskono (Corporate Secretary MNC Media Group), Arini Octaviani (Account Executive MNC Media Group), Jamal (Chief Editor MNC TV), Yadi (Chief Editor INews TV), Geong (Korlip Jurnalis MNC Group/Portal Inews), Herik Kurniawan (Pemred Inews Network) serta Litbang MNC Group.

Saat pertemuan dengan MNC Group, disampaikan bahwa Lemhannas RI sangat tertarik untuk menjajaki kerjasama dengan redaksi MNC Group dalam hal penyebaran nilai-nilai kebangsaan. Hal tersebut, diterima dengan sangat terbuka oleh pimpinan redaksi MNC Group.

Selain itu, melihat perkembangan politik yang dinamis, para pemimpin redaksi MNC Media Group sangat berharap dapat beraudiensi dengan Gubernur Lemhannas RI untuk membicarakan situasi terkini, serta menjalin adanya kemungkinan kerjasama berupa pemberian materi wawasan kebangsaan kepada jurnalis MNC Media Group. Hal ini ditujukan agar para jurnalis Media Group memiliki pandangan yang komprehensif terhadap peristiwa yang tengah terjadi, seperti aksi terorisme yang terjadi belakangan.

Pada kunjungan selanjutnya, yaitu ke LPP RRI, Karo Humas didampingi oleh Kabag Protbok Kolonel Laut (P) Eddy Tarjono, Kasubbag Protokol Letkol Inf M. Isdar, Kasubbag Dokumentasi Letkol Inf Adlansyah M., dan Kasubbag Hubanlem Endah Heliana. Kunjungan tersebut diterima oleh Direktur Utama LPP RRI H. Mohammad Rohanuddin yang didampingi oleh Direktur Program dan Produksi Soleman Yusuf, serta Kepala Pusat Pemberitaan Pro-3 RRI Widhi Kurniawan di Ruang Tamu Pimian LPP RRI, Jakarta Pusat.



Dalam pertemuannya dengan pimpinan LPP RRI, Mindarto menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari silaturahmi dalam rangka mempererat hubungan dan meningkatkan kerja sama antara Lemhannas RI dan LPP RRI. Terkait dengan hal itu, Soleman Yusuf menyampaikan LPP RRI tertarik untuk bekerjasama dengan Lemhannas RI untuk menyelenggarakan Dialog Kebangsaan.

"Untuk masalah terkait dengan Dialog Kebangsaan, LPP RRI sangat membuka diri, karena mempererat masalah kebangsaan memang bagian dari tugas dan fungsi kami," kata Mohammad Rohanuddin. Akan tetapi, Soleman Yusuf menambahkan, "Dialog kebangsaan tiga bulan sekali sangat sedikit, kalau bisa setiap bulan. Jangan sampai para pendengar terlanjur lupa dengan informasi terkait masalah kebangsaan." Direncanakan, launching Dialog Kebangsaan akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Media Massa di

Lemhannas RI. Selain itu, LPP RRI juga mengundang Gubernur Lemhannas RI sebagai orator dalam acara Konser Kebangsaan LPP RRI yang akan diselenggarakan pada awal Agustus 2018 di Makassar, Sulawesi Selatan.

LPP RRI telah menunjukkan prestasinya sebagai stasiun radio yang menjadi konsumsi utama bagi masyarakat Indonesia. Sampai saat ini, RRI telah memiliki 97 stasiun dan 222 stasiun relay di Indonesia. "Selain itu, dalam Pesta Akbar Sepak Bola Piala Dunia 2018 di Rusia, LPP RRI telah dipercaya untuk menyiarkan pertandingan sepakbola secara langsung ke seluruh pendengar se-tanah air," kata Mohammad Rohanuddin.

Pada kunjungan yang kedua, jajaran pejabat Biro Humas ditemui oleh Direktur Utama LPP TVRI Helmy Yahya dan Direktur Umum Tumpak Pasaribu di Ruang Tamu Pimpinan LPP TVRI, Jakarta Pusat. Helmy Yahya menyebutkan, LPP TVRI saat ini tengah mengembangkan diri dengan menjadi televisi yang mampu

menyampaikan misi-misi kebangsaan lewat acara yang mudah diterima oleh masyarakat. "Saat ini TVRI sudah membungkus acara kebangsaan dengan kemasan yang lebih menarik dan mudah diterima oleh masyarakat, seperti program Gue Pancasila, atau sitcom yang melibatkan komika-komika nasional," kata Helmy Yahya.

Mindarto menyampaikan bahwa, Lemhannas RI berharap bisa bekerja sama dengan TVRI dalam mengadakan acara semacam talkshow terkait dengan wawasan kebangsaan. Menyikapi ide tersebut, Helmy Yahya menyampaikan bahwa materi-materi kebangsaan saat ini perlu dikemas dengan cara yang lebih menarik dan tidak monoton, seperti diskusi sambil berjalan bersama Gubernur Lemhannas RI di tepi pantai, atau saat penyelenggaraan kelas Program Pendidikan Reguler Lemhannas RI.



## Lemhannas RI Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Tiga Lembaga Sekaligus

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menandatangani Nota Kesepahaman dengan tiga lembaga sekaligus yakni Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) di Ruang Nusantara Gedung Trigatra Lemhannas RI (23/4). Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala LAN RI Dr. Adi Suryanto, M.Si. Ketua Umum KADIN Rosan Perkasa Roeslani, dan Ketua Umum IPPAT Dr. Syafran Sofyan, S.H., Sp.N., M.Hum.

**N**ota kesepahaman tersebut merupakan bentuk kerja sama tentang peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan calon pimpinan tingkat nasional, pelatihan dan pengembangan kompetensi pendidikan tinggi, pertukaran SDM ahli dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Poin penting lain yang ingin dicapai dalam kerja sama ini yakni dalam hal pertukaran informasi, pengkajian dan dukungan teknologi dalam rangka pengukuran ketahanan nasional, pelaksanaan pengkajian, dan terkait bidang lainnya yang telah disepakati oleh semua pihak.

Agus Widjojo menjelaskan tujuan penandatanganan nota kesepahaman ini untuk membangun sinergitas Lemhannas RI dengan ketiga lembaga dalam mewujudkan ketahanan nasional. "Dengan ditandatanganinya naskah nota kesepahaman tersebut, diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang lebih teknis untuk menentukan berbagai bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan melalui kerja sama ini, diharapkan terbentuk sinergitas antara Lemhannas RI, dengan LAN RI,

KADIN Indonesia, dan IPPAT dalam mewujudkan ketahanan nasional," ujar Agus Widjojo.

Dengan terjalannya kerja sama ini pula diharapkan dapat menjadi instrumen dalam memperkuat wawasan kebangsaan masyarakat Indonesia, termasuk SDM yang ada di dalam institusi terkait. Ketiga lembaga ini tentunya memiliki tugas dan fungsinya masing-masing yang tidak terlepas dari upaya mendukung pembangunan nasional.

Melalui penandatanganan ini, Ketua LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si. berharap bahwa Lemhannas RI, KADIN, dan LAN dapat menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan serta pengkajian di bidang administrasi negara serta mendorong tumbuh kembangnya inovasi di sektor publik tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Adi Suryanto menyadari bahwa lembaga yang dipimpinnya memiliki kesamaan fungsi dengan Lemhannas RI, terutama dalam bidang pendidikan dan pelatihan, oleh karena itu ia berharap bahwa keduanya dapat membangun sinergi. "Lemhannas dengan LAN mempunyai kesamaan fungsi, hanya area bermainnya masing-masing, meskipun disatu sisi kadang ada sedikit kompetisi, tetapi itu perlu karena





tanpa a d a n y a kompetitor kita tidak bisa meningkatkan kualitas,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum KADIN Rosan Perkasa Roeslani memandang perlunya diadakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi para anggotanya di tengah derasnya arus globalisasi yang semakin lama menggerus rasa nasionalisme para pengusaha Indonesia. “Penandatanganan ini akan dilanjutkan dengan perjanjian-perjanjian berikutnya dan pelatihan-pelatihan yang selama ini sudah dirasakan sangat berguna. Oleh sebab itu, kami mengharapkan para pengusaha yang mengikuti program kerja sama dengan Lemhannas menjadi pengusaha yang tangguh, berwawasan kebangsaan, dan tidak hanya mementingkan kepentingan pihaknya masing-masing, tentunya juga lebih mementingkan kepentingan dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” ujar Rosan.

IPPAT menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman dengan Lemhannas RI, agar kedepannya IPPAT dapat dilibatkan dalam hal memberikan masukan dan kajian yang berkaitan dengan hak atas tanah maupun peralihan hak atas tanah, serta pemberian pelatihan bagi para anggota IPPAT itu sendiri. “Di dalam pelaksanaannya, pemanfaatan tanah bumi, air dan ruang angkasa ini merupakan

pengejawantahan dari pasal 33 UUD 1945, yang mana berkaitan dengan hukum tanah, hukum keagrariaan, khususnya peralihan hak atas tanah. Jadi, di Indonesia masih sangat rawan, kalau dari di lihat dari pengukuran indeks ketahanan nasionalnya,” ujar Ketua Umum IPPAT Dr. Syafran Sofyan, S.H., Sp.N., M.Hum.

Syafran mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa kurang dari 70 persen tanah-tanah di Indonesia belum terdaftar dan terjadi tumpang tindih karena masih berasal dari hukum barat, hukum adat, hukum partikelir dan belum teridentifikasi sehingga rawan terjadi konflik. “Anggota kami juga sangat membutuhkan pendidikan dan pelatihan dari Lemhannas RI, karena mereka tanda tangan tetapi lupa kaitannya dengan bangsa yang lebih besar, makanya banyak juga pulau-pulau bisa dijual, dialihkan kepada pihak-pihak yang tidak berwenang atau pihak asing,” ungkap Syafran. [AS]

*“Di dalam pelaksanaannya, pemanfaatan tanah, bumi, air dan ruang angkasa ini merupakan pengejawantahan dari pasal 33 UUD 1945, yang mana berkaitan dengan hukum tanah, hukum keagrariaan, khususnya peralihan hak atas tanah”*

*-Ketua Umum IPPAT Dr. Syafran Sofyan, S.H., Sp.N., M.Hum.*





# Kepala BNPB: Perubahan Iklim Ancam Ketahanan Nasional Indonesia

Tidak hanya pada sektor ekonomi saja yang dirugikan, tetapi rusaknya lingkungan serta musnahnya flora dan fauna, dan yang terpenting adalah reputasi bangsa yang ikut tercoreng.

“Setiap Presiden RI berkunjung ke luar negeri selalu ditanyakan mengenai deforestasi dan kerusakan lingkungan, dianggap bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar tetapi tidak bisa menangani masalah kebakaran hutan dan lahan. Namun upaya diplomasi yang kita lakukan dapat meyakinkan, hingga di tahun 2016 dan 2017 kita mampu mengatasi kebakaran hutan,” katanya.

Naiknya permukaan air laut dan cuaca ekstrem juga sempat disinggung oleh Willem bahwa salah satunya disebabkan oleh pemanasan global, yang mengakibatkan penguapan es mencair sehingga berdampak pada hilangnya pulau-pulau karena tenggelam. Begitu pula dengan cuaca ekstrem yang sangat merugikan terutama petani dan nelayan, karena akan berpengaruh terhadap pembibitan, pola tanam, waktu tanam, kualitas serta jumlah produksi.

Tak hanya itu, cuaca ekstrem juga dapat menyebabkan kekeringan atau banjir sehingga gagal panen akan lebih sering terjadi. Kurangnya produksi pertanian menyebabkan ketergantungan impor dan resiko bencana kelaparan. Indonesia sebagai negara agraris dan kepulauan, tentunya kondisi dinamis perubahan iklim ini menjadi tantangan sekaligus ancaman yang berdampak terhadap ketahanan nasional bangsa.

“Menurut Willem di hadapan peserta PPRA LVII, perubahan iklim berdampak pada ketahanan sosial, seperti menurunnya pendapatan masyarakat akibat cuaca ekstrem,

gagal panen, tidak bisa melaut yang nilai kerugiannya luar biasa. Hal ini akan menambah angka kemiskinan. Ia melanjutkan bahwa saat ini BNPB bekerjasama dengan BMKG daerah dalam menyosialisasikan kepada petani mengenai kalender tanam.

“Berbicara mengenai penanggulangan perubahan iklim dan bencana merupakan permasalahan yang sangat multi dimensi sehingga tidak mungkin pemerintah dapat menangani masalah ini tanpa bantuan dari seluruh elemen bangsa,” kata Willem. Menurutnya, perubahan iklim dapat ditangani dengan melakukan dua hal, yaitu mitigasi dengan menekan laju deforestasi dan degradasi, meningkatkan penanaman hutan dan pengamanan dari pembakaran dan pembalakan liar, serta melakukan penghematan energi dengan cara menggunakan bahan bakar yang lebih bersih dan penggunaan energi baru dan terbarukan.

Selanjutnya, perlu dilakukan adaptasi, yakni bertujuan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan daya tahan terhadap dampak perubahan iklim. “Proses adaptasi dapat ditempuh dengan cara penguatan peraturan perundang-undangan, kapasitas kelembagaan dan pengarusutamaan perubahan iklim ke dalam Agenda Perubahan Nasional. Sedangkan untuk mengurangi resiko bencana dengan meningkatkan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat,” jelas Willem. [AS]



## **K. H. Muhammad Cholil Nafis, Lc. M.A., Ph.D.: Seorang Pemimpin Harus Mampu Memelihara Agama dan Stabilitas Hubungan Antar Manusia Dalam Peringatan Nuzulul Quran Lemhannas RI**

"Al Quran merupakan panduan bagi segenap manusia. Salah satu tandanya yaitu Islam adalah agama yang mengakomodir segenap manusia dengan berbagai latar belakang sebagaimana yang tercantum dalam Al Quran yaitu surah An Nas," kata K.H. Muhammad Cholil Nafis, Lc. M.A. Ph.D. dalam Peringatan Nuzulul Quran Lemhannas RI (4/6)

**L**emhannas RI menyelenggarakan peringatan Nuzulul Quran dengan mengangkat tema "Dengan Peringatan Nuzulul Quran Kita Jadikan Al Quran Sebagai Pedoman dan Pegangan Hidup dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara" di Ruang Gajah Mada dan menghadirkan Cholil Nafis sebagai penceramah.

Selain berprofesi sebagai dosen, Cholil Nafis saat ini juga menjabat sebagai Ketua Umum Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU), Ketua Bid. Keagamaan International Conference of Islamic Scholars (ICIS), serta Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat.

Peringatan Nuzulul Quran diawali dengan pembacaan ayat suci Alquran oleh Ruslizar anggota Kedepatian Taplai Lemhannas RI dan sari tilawah oleh Fitria anggota Bag TU Biro Umum Settama Lemhannas RI. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan ketua umum IKAL, perwakilan peserta PPRa LVII dan LVIII, segenap pejabat struktural, pegawai, dan perwakilan Perista Lemhannas RI.


Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo pada saat pembukaan kegiatan menyampaikan, peringatan Nuzulul Quran merupakan momen yang penting, sebab Al Quran merupakan panduan bagi seluruh umat manusia, baik hubungannya kepada Allah SWT, maupun kepada sesama.

"Al Quran menyuruh kita untuk menjaga toleransi antar umat yang memiliki beragam latar belakang baik suku, agama, ras, maupun golongan, agar tidak tercerai-

berai. Sebagai bangsa yang satu, bangsa yang beragama, kita juga diminta untuk menjaga nama baik agama," kata Agus Widjojo. Selain itu, Agus Widjojo juga menyampaikan, terdapat banyak hikmah dalam bulan Ramadhan, segala kegiatan yang dilakukan bernilai ibadah, untuk itu diharapkan semua umat muslim dapat menjalankan ibadah dengan baik.

"Sesungguhnya bila seseorang mengkonsumsi yang bukan haknya maka akan muncul sesuatu yang menyimpang dalam dirinya, begitupula bila kita menyimpang dari manual books kita sebagai umat Islam, yaitu Al Quran. Allah SWT menjanjikan bagi siapapun yang menghafal Alquran dijamin kesejahterannya. Akan tetapi, ironi bagi negara yang 80 persennya adalah umat Islam, menurut survei LSI hanya 60 persen saja yang bisa membaca Al Quran," ujar Cholil Nafis.

Menyikapi perkembangan terkini, Cholil Nafis menyebutkan bahwa umat muslim harus memahami Al Quran secara seutuhnya, tidak separuh-separuh. "Seorang muslim tak hanya cukup menjadi baik, tetapi juga harus muslim (shalih), baik, reformis, semua didasarkan pada 'Iqra', pada intelektualitas," ujar pria yang bekerja juga sebagai dosen ini. Akan tetapi, pemimpin yang memiliki pengetahuan dan intelektualitas tanpa didasari dengan kesadaran bahwa Allah SWT yang menciptakan segenap makhluk yang ada dunia, hanya akan menjadikan pemimpin tersebut sombong. "Iqra' tanpa 'bismi rabbikal-ladzi khalaq', intelektualitas tanpa kesadaran bahwa Allah SWT adalah Maha Pencipta akan membuat seseorang



**“Seorang muslim tak hanya cukup menjadi baik, tetapi juga harus muslih (shalih), baik, reformis, semua didasarkan pada ‘Iqra’, pada intelektualitas.”**

- K. H. Muhammad Cholil Nafis, Lc. M.A., Ph.D. Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat.

pemimpin menjadi angkuh dan sombong, merasa paling benar,” kata pria yang menamatkan program doktoralnya di University of Malaya, Malaysia pada 2013 ini.

Menyikapi kondisi terkini terkait aksi bom bunuh diri, Cholil Nafis sangat menyayangkan tindakan tersebut. “Yang dibutuhkan Islam bukan orang yang berani mati, tetapi berani hidup, hidup dengan karyanya, dengan manfaat yang diberikan kepada umat. Saat ini kita dihadapkan oleh pemahaman yang tidak komprehensif terhadap agama, diambil sepotong-potong,” kata Cholil Nafis.

Cholil Nafis mengajak para hadirin agar tidak memperdebatkan Pancasila, sebab Pancasila sudah sejalan dengan Islam dan Al Quran. “Kita tidak perlu memperdebatkan Pancasila dan NKRI, yang perlu kita lakukan saat ini adalah mengisi Pancasila dengan amal, ibadah, dan kegiatan yang penuh manfaat,” kata Cholil Nafis melanjutkan.

Sebagai penutup, Cholil Nafis mengutip Trilogi Ukhuwah (Trilogi Persaudaraan) dari Rais Am PBNU K.H. Ahmad Shiddiq sebagai panduan para pemimpin di negeri ini. “Trilogi Ukhuwah atau Trilogi Persaudaraan ini penting untuk menjaga kesatuan NKRI. Ukhuwah

Islamiyah (persaudaraan umat Islam), Ukhuwah Wathaniyah (persaudaraan bangsa), Ukhuwah Basyariyah (persaudaraan umat manusia). Ukhuwah Basyariyah juga disebut sebagai ukhuwah insaniyah.

Pada konsep Ukhuwah Islamiyah, seseorang merasa saling bersaudara satu sama lain karena sama-sama memeluk agama Islam. Umat islam yang dimaksudkan bisa berada di belahan dunia mana pun. Dalam konsep Ukhuwah Wathaniyah, seseorang merasa saling bersaudara satu sama lain karena merupakan bagian dari bangsa yang satu, misalnya bangsa Indonesia. Dalam konsep Ukhuwah Basyariyah, seseorang merasa saling bersaudara satu sama lain karena merupakan bagian dari umat manusia yang satu yang menyebar di berbagai penjuru dunia. Dalam konteks ini, semua umat manusia sama-sama merupakan makhluk ciptaan tuhan. Ukhuwah Basyariyah tidak dibatasi oleh baju luar dan sekat-sekat primordial seperti agama, suk, ras, bahasa, jenis kelamin, dan sebagainya. Hakikat dari ketiga ukhuwah tersebut bahwa pemimpin harus mampu untuk memelihara dua hal, yaitu agama (ad diin) dan stabilitas hubungan antar manusia.”

# US National War College Diskusikan Isu Geopolitik, Ekonomi, dan Keamanan Indonesia di Lemhannas RI



US National War College melakukan diskusi mengenai isu geopolitik, ekonomi, dan keamanan Indonesia bersama para pejabat Lemhannas RI dan peserta PPRA LVII di Anjungan Gedung Trigatra, Lemhannas RI (9/4). Rombongan US National War College (USNWC) dipimpin oleh Prof. Zachry Abuza – profesor dari USNWC yang membidangi Asia Tenggara, terutama isu-isu transnasional seperti terorisme, *illegal fishing*, dan lain-lain. Diskusi dipandu oleh Taprof Bidang Kepemimpinan Nasional Lemhannas RI Mayjen TNI (Purn) Albert Inkiriwang sebagai Moderator, dan Tenaga Ahli Pengajar Bidang Hukum dan Hak Azasi Manusia Lemhannas RI Irjen. Pol. Dr. Drs. H. Anas Yusuf, Dipl.krim., S.H., M.H., M.M. sebagai pemapar.

Sementara itu, perwakilan dari Lemhannas RI yaitu Irjen. Pol. Dr. Drs. H. Anas Yusuf, Dipl.krim., S.H., M.H., M.M. membawakan materi mengenai Kesuksesan Indonesia dalam Aspek Penegakan Hukum Menanggulangi Terorisme dan Strategi Indonesia dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional.

"Indonesia saat ini tengah menduduki sebagai negara dengan

level ancaman yang tinggi," kata Anas Yusuf mengawali paparannya. Indonesia bersama negara Australia, Rusia, India, Afghanistan, dan negara-negara jazirah Arab tengah menghadapi isu ancaman keamanan yang serius, yaitu terorisme. Kemudian, Anas menjelaskan mengenai jaringan terorisme di Asia Tenggara dan Indonesia. "Jaringan teroris Indonesia, terhubung dengan konflik di Irak dan Suriah. Setelah kehancuran Marawi,

kedatangan jaringan teroris saat ini menggunakan modus operandi pekerja ilegal (*illegal worker*) dan nelayan ilegal di sekitar timur Kalimantan dan utara Sulawesi," kata Anas melanjutkan. Selain penggunaan jalur yang digunakan, saat ini POLRI juga mencatat lokasi-lokasi yang dijadikan tempat pelatihan militer bagi teroris di Indonesia. "Tempat pelatihannya, tersebar hampir di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, hingga di timur Indonesia, yakni Maluku," kata Anas.

Penyebaran paham terorisme saat ini juga didukung oleh masifnya informasi mengenai gerakan terorisme di dunia maya (*cyberspace activities*). "Bentuk kegiatan di dunia maya meliputi rekrutmen, propaganda, komunikasi, hingga informasi pelatihan, penyebaran logistik, perencanaan, eksekusi, sampai pendanaan. Informasi-informasi tersebut tersedia di channel Facebook, Twitter, web-web radikal, jaringan radio, hingga aplikasi pesan yang mudah diakses siapa saja melalui gawai," kata Anas Yusuf melanjutkan.

Untuk mengatasi tingginya radikalisme di Indonesia, saat ini POLRI telah bekerja sama dengan pemuka agama, seperti Majelis Ulama Indonesia, serta kerjasama antar intelijen TNI dan





#### POLRI.

Salah satu hal yang perlu diwaspadai oleh Indonesia yaitu, sekitar 1.300 orang di Asia Tenggara yang berperang di Irak. Dari pola yang ada, POLRI melihat bahwa perempuan dan anak-anak juga terpapar propaganda terorisme. "Anak-anak yang terpapar propaganda terorisme, berusia antara 14-16 tahun," kata Anas Yusuf.

Pemerintah Indonesia menangani terorisme dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan "soft power" yaitu melalui deteksi dini dan operasi intelijen, deradikalisasi secara komprehensif, *profiling and monitoring, penetrasi, cyber patrol*, melakukan pendekatan dengan mantan teroris, kerjasama nasional dan internasional, dan pengendalian media mainstream. Sementara itu pendekatan "hard power" dilakukan melalui operasi intelijen dan penegakan hukum.

Sesuai paparan oleh Anas Yusuf, Prof. Zachry Abuza menyampaikan apresiasinya terhadap Lemhannas RI. "Sebuah penghargaan bagi kami untuk datang ke sini, ke Lemhannas RI. Saya ke sini datang untuk mengapresiasi atas apa yang Indonesia telah capai selama ini dalam menanggulangi terorisme, dalam berdemokrasi, dan penegakan hukum, dan penegakan HAM," kata Zachry Abuza.

"Saat ini, Indonesia menerapkan strategi *inter-agency, societal network*. Indonesia sangat bagus dalam membangun institusi dalam pencegahan terorisme dan intelijen seperti *intelligence financial* unit. Sebagai akademisi, perkembangan penanggulangan terorisme di Indonesia berada di arah yang benar, terutama sebagai negara demokrasi. Tidak ada seorang pun yang melegitimasi tindakan terorisme seperti yang kita lihat di Irak dan Suriah," kata Zachry Abuza melanjutkan.

"Terorisme sangat dipengaruhi oleh tren global. Perlu memikirkan tren baru, pola baru, seperti di Myanmar, Bangladesh, dengan adanya berjuta-juta pengungsi. Untuk itu, saya berharap kepada teman-teman saya di Indonesia untuk dapat berperan aktif dalam memimpin kawasan ini, terutama dalam manajemen perbatasan. Indonesia perlu bekerja sama

dengan negara lain, seperti Malaysia, Thailand," kata Zachry Abuza.

Menyikapi perkembangan saat ini, Zachry Abuza menambahkan bahwa rekrutmen terorisme saat ini sangat berbeda antar satu negara dengan negara lain. Di Malaysia, saat ini sudah menggunakan jaringan online," kata Zachry Abuza. Selain itu, Zachry Abuza mengapresiasi terkait peran Indonesia dalam penyelesaian konflik di Myanmar dan Thailand Selatan. "Indonesia mempunyai peranan penting dalam konflik di Myanmar dan Thailand Selatan. Akan tetapi tidak hanya berhenti di situ, dialog tetap diperlukan," kata Abuza.



***"Indonesia sangat bagus dalam membangun institusi dalam pencegahan terorisme dan intelijen seperti intelligence financial unit. Sebagai akademisi, perkembangan penanggulangan terorisme di Indonesia berada di arah yang benar, terutama sebagai negara demokrasi."***

-Prof. Zachry Abuza Pimpinan Rombongan US National War College (USNWC)

# Halalbihalal Jadi Momen Perkuat Tali Silaturahmi Pegawai Lemhannas RI

**S**etelah cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1437 H, Senin (11/7), Lemhannas RI menggelar kegiatan halalbihalal yang diikuti oleh seluruh pejabat struktural Lemhannas RI, Ketua Umum IKAL dan perwakilannya, tenaga ahli pengajar, tenaga ahli pengkaji, tenaga profesional, peserta PPRA LVII dan PPRA LVIII, dan segenap pegawai Lemhannas.

Halalbihalal sendiri merupakan momen yang tepat untuk memperbaharui dan mempererat kebersamaan serta persaudaraan.

"Makna yang dapat kita petik antara lain pembersihan diri dari kesalahan, pembersihan hati dari rasa benci, dan memupuk kepedulian serta kebersamaan. Dalam konteks motivasi dan kinerja, momen halalbihalal menjadi dasar



Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam kegiatan tersebut menyampaikan, bahwa dengan halalbihalal umat Islam melebur kesalahannya melalui berbagi maaf tanpa sekat yang membatasi.

terbangunnya akhlak moral dan kebersamaan untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara dengan menjawab berbagai tantangan tugas maupun tanggung jawab Lemhannas RI ke depan," demikian ungkap Agus Widjojo.





Halalbihalal merupakan tradisi yang lahir di Indonesia yang dilaksanakan setelah pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi, menjaga harmoni masyarakat, dan juga rekonsiliasi. Kegiatan halalbihalal terinspirasi dengan tradisi yang diselenggarakan oleh Sultan Mangkunegara I (Keraton Surakarta) yang mengadakan pertemuan silaturahmi antara raja dan para pegawai istana setelah perayaan Idul Fitri. Di masa awal kemerdekaan pun Presiden RI

Soekarno menyelenggarakannya untuk bersama-sama saling memaafkan. Kegiatan ini diberi nama halalbihalal dan tradisi ini pun kemudian diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia hingga kini. Usai bersalaman yang dilanjutkan dengan ramah tamah oleh seluruh peserta halalbihalal. (END)

***“Momen halalbihalal menjadi dasar terbangunnya akhlak moral dan kebersamaan untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara dengan menjawab berbagai tantangan tugas maupun tanggung jawab Lemhannas RI ke depan”***

*-Gubernur Lemhannas RI Let Jend TNI (Purn) Agus Widjojo*



# Peter M Senge

Senior Lecturer  
MIT Sloan School of Management

## Peter Senge Hadir Berikan Materi Mengenai Collaborative Working Pada Peserta Making Indonesia 4.0

Wakil Presiden RI H.M. Jusuf Kalla secara resmi membuka Program Penguatan Kapasitas Pemimpin Indonesia "System Leadership for Innovation 4.0" yang digelar di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (7/6) pagi. Program ini oleh Presiden Joko Widodo dirancang sebagai sebuah roadmap (peta jalan) pemerintah dalam mempersiapkan para pemimpin bangsa untuk menghadapi era revolusi ke empat yakni Revolusi Industri 4.0.

Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 700 peserta dari berbagai latar belakang yang terdiri dari pemimpin instansi pemerintahan pusat dan daerah, sektor swasta dan industri, tenaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, kalangan akademisi, dan mahasiswa dari seluruh Indonesia. Program tersebut menghadirkan narasumber Peter Michael Senge, penemu organisasi pembelajar (*organizational learning*). Peter Senge adalah peneliti asal AS yang juga pengajar senior di MIT Sloan School of Management di New England Complex System Institute, salah satu karyanya adalah buku *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization*.

### Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0

"Semua zaman mempunyai ciri sendiri-sendiri yang kita sebut perubahan, atau revolusi. Semua bangsa mempunyai rencana bagaimana memajukan bangsanya, begitupun Indonesia mempunyai ciri sendiri dalam memajukan bangsa," ujar Jusuf Kalla dalam sambutannya.

Menurut JK, sejak empat tahun terakhir Presiden mendorong pemerintah dalam hal Revolusi Mental, dan sejak dua bulan yang lalu *roadmap* Revolusi Industri 4.0 diluncurkan Presiden Jokowi. Hendaknya *roadmap* tersebut dijadikan pedoman oleh seluruh kementerian/lembaga di beberapa industri. "Hal itu dibutuhkan pengetahuan, para menteri dan teman lain di tingkat pemerintahan, maka diskusi dan pertemuan ini yang

disebutkan oleh Kemenkomaritim, Lemhannas dan Kemenristekdikti serta UID, tentu ini akan membuka pikiran kita bagaimana menjalankan semuanya," ujar Jusuf Kalla. JK juga mengatakan bahwa perubahan memiliki dampak positif dan negatif, dimana sistem industri menjadi lebih otomatisasi, robotic dan tentunya setiap persiapan selalu dimenangkan oleh produksi dengan kualitas yang lebih baik.

"Program penguatan kapasitas pemimpin merupakan program nasional yang sangat penting dan tepat waktu untuk membekali pemimpin Indonesia," ujar Muhamad Nasir sebagai Koordinator kegiatan. Revolusi Industri 4.0 atau yang dikenal dengan era *cyber physical system*, termasuk di dalamnya ekonomi digital, *internet of things*,



*robotic, big data, artificial intelligent*, telah memunculkan teknologi yang memfasilitasi perkembangan inovasi. Menurutnya Indonesia perlu melakukan transformasi yang lebih cepat, dengan menciptakan figur para pemimpin yang dapat mempercepat proses perubahan. "Bekerja hendaknya menjadi proses inspiratif dan dapat menjadikan generasi bangsa Indonesia untuk berdiri sejajar dan berjalan bersama bahkan menjadi pemenang," ujar M.Nasir.

### **Collaborative Working atau Bekerja Kolaboratif**

Mengawali kegiatan, dibuka diskusi oleh Desi Anwar, Jurnalis Senior Indonesia serta Shobi Lawalata, Manager of Learning Division United in Diversity. Desi dan Shobi yang sebelumnya mengikuti Program Ideas yang dibentuk oleh Peter M. Senge berbagi pengalaman mengenai program yang pernah dijalaninya.

"Dalam kelas Ideas 3, Peter meminta saya untuk refleksi dengan sendiri, tentang perjalanan dari Internet of All things. Kata kunci utama dari semua perjalanan ini adalah 'disrupsi'. Saat ini, kita memiliki perusahaan dengan tidak ada mobil satu pun yaitu Uber, perusahaan tanpa kamar satu pun yaitu Air B n

B', perusahaan ojek tanpa motor satu pun yaitu 'Gojek', dan sebagainya," kata Desi Anwar.

Desi Anwar menyebutkan, para pebisnis media awalnya hanya memikirkan pendirian perusahaan media hanya sebagai kegiatan berbisnis saja. akan tetapi tidak memikirkan bagaimana media mendorong perubahan hingga tahun 1998. "Kita ingat pada tahun 1990 dulu, media hanya satu tv, dengan sistem autokratik. Pada saat itu, televisi swasta dimiliki oleh satu anak dari presiden Soeharto. Kemudian saya ingat, waktu itu saya mendapat telepon dari pemilik media tempat saya bekerja, Bapak Bambang Tri yaitu "di televisi saya sendiri, ada ucapan untuk meminta ayah saya untuk lengser". Itulah disebut oleh unintended consequences. Berdampak pada a, b, c, dan d. Namun menurut saya tanpa adanya tv pertama, tidak ada tv nasional, dan tidak ada tv daerah selanjutnya, sejarah Indonesia akan sangat berbeda dan tidak ada perubahan seperti saat ini, tidak ada namanya the internet of all things, digital life," kata Desi Anwar.

Peter M. Senge menyebutkan bahwa hal pertama yang perlu diketahui oleh masyarakat saat ini adalah mempelajari mengenai

munculnya Inovation 4.0. "Hal pertama yang perlu dipelajari adalah mengenai sejarah munculnya Inovation 4.0. Ide yang penting sangatlah sederhana, yaitu kesadaran yang paling sederhana atas gap antara kenyataan dan kemampuan (gap of reality and ability), tidak ada yang tahu dengan pasti bagaimana untuk menghandle perubahan iklim, atau sesungguhnya kita menciptakan kemiskinan yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya," kata Peter M. Senge.

Menurut Peter, melihat permasalahan dan krisis yang hadir di Indonesia akibat industrialisasi dan digitalisasi saat ini dapat diatasi dengan bekerja sama. "Saat ini ada logika industrialisasi, bahwa lebih murah, lebih cepat, dan lebih baik. Logika tersebut pada perjalanannya menghasilkan permasalahan pada masyarakat. Untuk melihat masalah tersebut, lebih baik kita bekerja sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ide utamanya adalah untuk menjadikan satu bisnis swasta, pemerintahan, dan masyarakat sipil. Karena kita harus bekerja bersama melintasi batas-batas yang ada," kata Peter melanjutkan.

Dua dekade yang lalu kebiasaan bekerjasama lintas batas belum muncul

menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang ada masih bersifat paternalistik, yaitu menunggu pimpinan menyelesaikan permasalahan. Peter D. Senge menjelaskan, "Dua dekade yang lalu, kebiasaannya memang tidak seperti itu. Dulu situasi yang ada adalah budaya 'menunggu bos', setiap orang selalu menanti/melihat bos. Akan tetapi saat ini ide utamanya adalah tim. Tim adalah solusi masa depan mengenai bagaimana masalah dapat diselesaikan di seluruh dunia atau disebut dengan *Collaborative Working*."

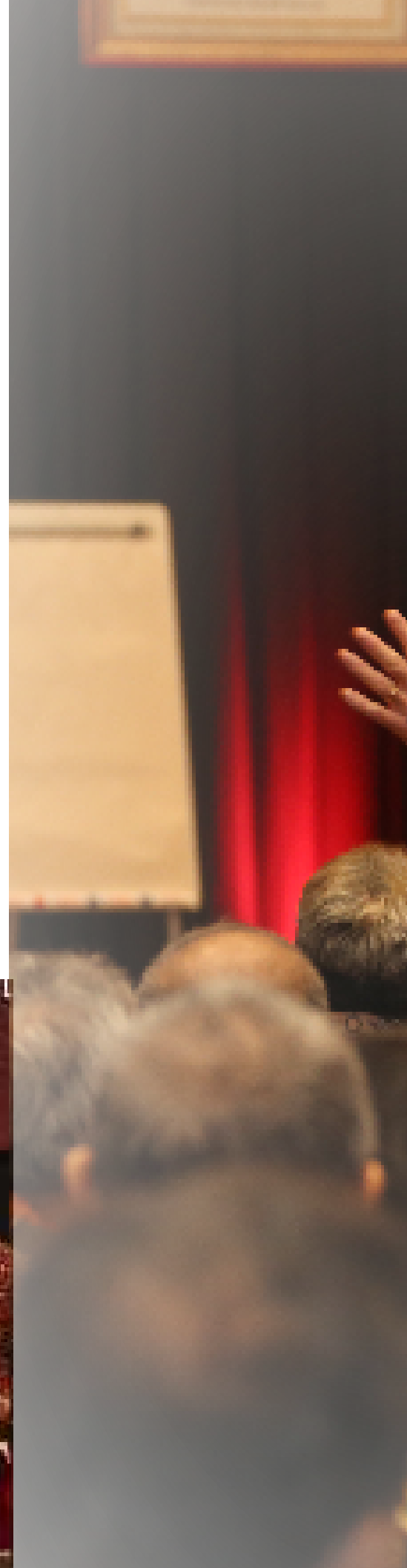
Peter mengatakan bahwa saat ini memang masih ada hirarki, tapi semua diselesaikan bersama sama tim (*collaborative working*). Bekerja melintasi sektor saat ini telah terjadi pada organisasi pemerintah dan swasta. "Jaringan dari orang-orang yang melewati batas, jadi itu satu-satunya ide dari program ini. Kita harus belajar bekerja sama dengan tim untuk masa depan yang akan menyelesaikan masalah. Tidak hanya satu tim saja, akan tetapi akan ada tim yang melintasi antar sektor organisasi," kata Peter.

Diskusi kemudian dilanjutkan dengan pembentukan kelompok masing-masing yang terdiri dari empat sampai lima peserta dengan berbagai latar belakang. Dalam

kesempatan tersebut, masing-masing peserta diminta untuk sama-sama bercerita dan mendengarkan mengenai permasalahan yang membuat khawatir masing-masing peserta. "Kemampuan utama yang dibutuhkan seorang pemimpin adalah mendengarkan," kata Peter M. Senge.

Dalam kesempatan tersebut hadir juga Suyoto, Bupati Bojonegoro yang menjadi success story dalam Program Ideas. Saat ini, kabupaten Bojonegoro terpilih mewakili Indonesia sebagai daerah percontohan pada ajang "Open Government Partnership (OGP) Subnational Government Pilot Program" atau Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka. Berita baik ini akan segera diumumkan resmi oleh Sekretariat OGP dalam waktu dekat. Kabupaten Bojonegoro bersama Kota Seoul (Korea Selatan) dan Kota Tbilisi (Georgia) adalah percontohan pemerintah daerah pertama di Asia, bersanding dengan 13 kota besar di dunia dari 45 kota yang mendaftar pada ajang ini.

"Terdapat 'intended' dan 'unintended consequences' dalam demokrasi dan pembentukan otonomi daerah. Idealnya otonomi tujuannya adalah lebih cepat menangani masalah-masalah lokal dan meningkatkan kesejahteraan. Akan tetapi, ada 'unintended





*"Tim adalah solusi masa depan mengenai bagaimana masalah dapat diselesaikan di seluruh dunia atau disebut dengan Collaborative Working."*

-Peter M. Senge Penulis buku *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization*



*consequences'* dari hal tersebut yaitu korupsi dan mis-management," kata Suyoto, Bupati Bojonegoro.

"Dulu Kabupaten Bojonegoro adalah daerah miskin dari jaman Indonesia merdeka sampai tahun 2000. Tahun 2009 saya mulai bekerja, dari Bank Dunia menyebutkan bahwa bojonegoro adalah salah satu daerah dengan tercepat kemajuannya. Pada saat saya menjadi bupati, saya membuka diri lebar-lebar. Saya memilih nomor handphone saya, saya bagikan kepada masyarakat di pendopo. Dampaknya orang yang tadinya apatis lebih optimis, politisi dan pebisnis mau datang dan terlibat," kata Suyoto.

"Saat ini tradisinya berubah dari tradisi berdebat menuju *strategic approach*. Perubahan yang terjadi yaitu sebelumnya 95 persen jalan

di Kabupaten Bojonegoro rusak. Kemudian rakyat memberikan ide untuk membuat *paving block*. Tadinya kalau pakai aspal Rp. 350 juta, kini jadi hanya Rp. 65 juta untuk paving block, karena untuk membangun jalan tersebut saya melibatkan semua, yaitu rakyat, pebisnis, hingga LSM terlibat," kata pria yang akrab dipanggil Kang Yoto tersebut.



## ***Plogging* dan Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-Hari**



**Arundati Shinta**  
Peserta PPRA 58 Lemhannas RI

**H**ampir setiap anak Indonesia tentu hapal urutan sila pada Pancasila. Hal ini karena Pancasila sudah diajarkan semenjak sekolah dasar, paling tidak setiap hari Senin pagi. Bila satu tahun ajaran diperkirakan terdiri dari 40 minggu, maka Pancasila juga dibacakan selama 40 kali pada upacara hari Senin. Jadi mulai SD-SMA, paling tidak setiap anak sudah mendengar tentang Pancasila sebanyak 40 minggu x 12 tahun bersekolah = 480 kali. Bila melanjutkan ke perguruan tinggi, maka paling tidak ia sudah mendengar dan mengucapkan Pancasila kira-kira 500 kali. Hal ini karena Pancasila menjadi pelajaran wajib di tingkat perguruan tinggi dan juga Pancasila selalu dibacakan pada acara wisuda.

Hitungan-hitungan sederhana itu untuk menekankan bahwa Pancasila sudah sangat merasuk di benak hampir semua warga negara Indonesia. Sebagian kecil masyarakat Indonesia mungkin belum pernah mendengar Pancasila. Mungkin mereka adalah masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, tidak sempat menempuh pendidikan, dan tidak tersentuh media massa apa pun. Hal ini karena Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau. Untuk mendorong anak-anak yang tidak mengetahui Pancasila, Presiden Joko Widodo hampir selalu mengadakan quiz tentang Pancasila ketika berkunjung ke daerah-daerah dengan hadiah sepeda. Presiden juga sudah mempublikasikan video *Saya Indonesia Saya Pancasila* (Kementerian Sekretariat Negara RI Sekretariat Presiden, 2017). Jadi seharusnya generasi muda dan orang

dewasa pada era global sekarang ini tentu memahami Pancasila.

Persoalannya, Pancasila cenderung tidak ditampakkan dalam perilaku nyata sehari-hari. Pancasila hanya dihapalkan saja. Tulisan ini akan membahas tentang Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang lingkungan hidup. Alasannya adalah bidang lingkungan hidup sering kurang diperhatikan oleh masyarakat. Buktinya, masyarakat lebih meributkan masalah pemilihan presiden / kepala daerah dan SARA (suku, agama, ras), daripada masalah lingkungan hidup. Padahal isu-isu lingkungan hidup yang tidak beres akan mengganggu kenyamanan hidup warga sehari-hari. Alasan kedua, bila lingkungan hidup – paling tidak di sekitar tempat tinggalnya – tidak diperhatikan, maka akan kemana lagi manusia akan hidup?



# PLOGGING

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam tulisan ini adalah melakukan *plogging* yaitu kegiatan yang sederhana, murah, mudah, dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Prinsip kegiatan itu adalah 3M yaitu mulai dari diri sendiri, mulai sekarang juga, dan mulai dari hal-hal kecil. *Plogging* adalah kegiatan berlari-lari kecil untuk olah raga (*jogging*) di jalan raya sambil mengambil sampah yang bertebaran di sepanjang jalan yang dilewati. *Plogging* adalah istilah dari negara Scandinavia. *Plogging* ini sangat menguras energi. Bila *jogging* hanya mengeluarkan energi sebesar 235 kalori, maka *plogging* menguras energi sampai 288 kalori untuk lari selama 30 menit. Hal ini karena dalam kegiatan *plogging*, seseorang harus berlari, membungkuk, dan menggendong sampah.

2018 Apa hubungan antara *plogging* dan pengamalan butir-butir Pancasila? *Plogging* erat hubungannya dengan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Semua agama mensyaratkan pemeluknya untuk membersihkan dirinya dan lingkungan sekitar, sebagai bukti keyakinan dan ketakwaan umat pada Tuhan Yang Maha Esa. Wujud keimanan itu juga tercermin dalam pembangunan regulasi diri internal. Orang dengan regulasi diri internal tinggi tidak akan membuang sampah sembarangan meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya. Hal ini karena membuang sampah sembarangan adalah bukan standar perilakunya.

Sila kedua Pancasila mengandung tiga nilai luhur yaitu saling mencintai sesama, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Hal ini terlihat dari lanjutan *plogging* yaitu menyerahkan hasil *plogging* kepada pemulung asli bila pemulung itu mau menerimanya. Pemulung asli tidak perlu bersusah payah mencari sampah.

Sila ketiga Pancasila mengandung makna cinta tanah air dan bangsa. Rasa cinta itu diungkapkan dengan menjaga kebersihan lingkungan, meskipun hal itu bukan kewajiban utamanya. Membersihkan lingkungan di jalan-jalan raya adalah tugas dari dinas kebersihan. Tugas itu tidak akan memberikan hasil optimal bila warga tidak terlibat secara aktif. Menjadikan diri sebagai model perilaku yang baik, akan menginspirasi orang lain untuk berbuat serupa.

Sila keempat Pancasila mengandung dua nilai luhur yaitu "mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, serta tidak memaksakan kehendak kepada orang lain". Negara dalam hal ini diwakili oleh Dinas Kebersihan akan sangat terbantu bila ada warga yang secara suka rela dan dengan senang hati (sambil berolah raga) memunguti sampah di sepanjang jalan yang dilaluinya. Tugas Dinas Kebersihan menjadi lebih ringan. Selanjutnya, kegiatan ini juga tidak memaksa agar orang lain ikut serta. Kegiatan ini memang bertujuan menginspirasi warga lain untuk terlibat. Oleh karena itu diri sendiri menjadi model perilaku terlebih dahulu.

Sila kelima Pancasila mengandung nilai luhur "tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum". *Plogging* ini justru membantu kepentingan umum yaitu membersihkan jalan raya. Selain itu, hasil *plogging* juga diserahkan di Bank Sampah setelah dipilah-pilah. Berpartisipasi di bank sampah telah berhasil memunculkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan sekaligus membantu perekonomian masyarakat.

Sebagai penutup dari tulisan ini, *plogging* sangat bermanfaat bagi diri sendiri, lingkungan sekitar, dan lingkungan secara makro (negara). Dampak bagi diri sendiri, *plogging* menyehatkan fisik sekaligus melatih regulasi diri internal. Regulasi diri internal ini sangat penting mengingat budaya masyarakat Indonesia adalah kolektif, sehingga regulasi dirinya bersifat eksternal. Regulasi diri eksternal yaitu orang bersedia patuh pada peraturan ketika ada orang lain yang melihatnya. Pancasila sangat menekankan pentingnya ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Ketakwaan itu dibuktikan dengan perilaku yang mencerminkan regulasi diri internal, yaitu bersedia patuh pada peraturan meskipun tidak ada orang yang melihatnya.



### Temu Kengen Istri Gubernur dan Wagub dari Masa ke Masa

Persatuan Istri Anggota Lemhannas RI (Perista) menggelar acara Temu Kengen Istri Gubernur dan Wakil Gubernur Dari Masa Ke Masa di ruang Dwiwarna Purwa, Gd.Pancagatra Lemhannas RI, Kamis (19/4) Pagi. Acara ini sebagai ajang silaturahmi dari para Istri Gubernur dan Wagub yang pernah menjabat di Lemhannas RI dari waktu ke waktu.



### Lemhannas RI Sosialisasikan Perubahan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI, maka dilakukan beberapa perubahan di dalam struktur organisasi lembaga yang meliputi ketiga ke deputian, yang disampaikan oleh Dirprog dan Bangtapp Debidtplaikbs Brigjen Pol. Drs. Rafli, S.H., di Auditorium Gajah Mada Lemhannas RI, Senin (30/4) pagi.



### Perpus Lemhannas RI Partisipasi dalam Perpunas Expo

Perpustakaan Lemhannas RI berpartisipasi dalam Perpunas Expo yang digelar oleh Perpustakaan Nasional RI di Jalan Medan Merdeka Selatan No.11 Jakarta Pusat, sejak 7 - 13 Mei 2018. Pameran ini diselenggarakan dalam rangka HUT Perpunas Ke- 38 yang jatuh pada tanggal 17 Mei 2018 dengan tema "Pustakawan Bergerak Menebarkan Virus Literasi". Kegiatan ini bertujuan untuk mengharmonisasikan diantara para pustakawan dalam menyebarkan berbagai informasi yang bersumber dari perpustakaan, sehingga penyebaran virus ini dapat ditularkan sampai kepada masyarakat luas.





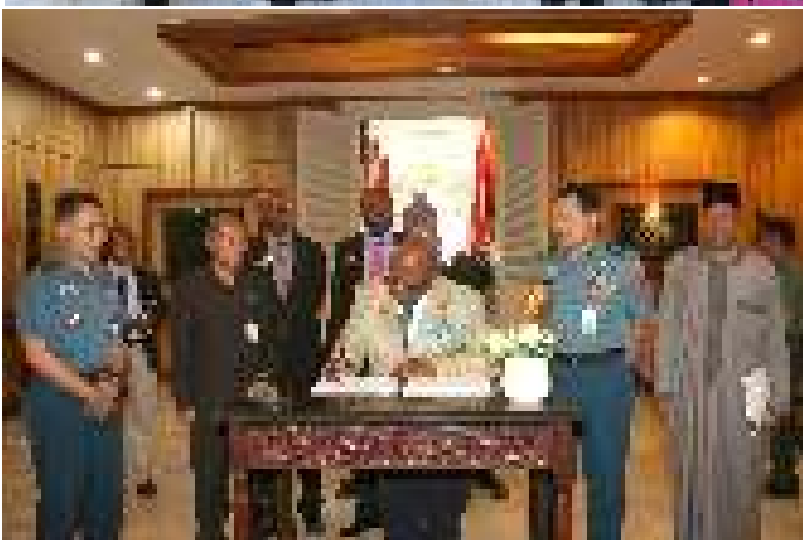
### Kunjungan KEIN ke Labkurtannas

11 (sebelas) anggota Tim Pokja Industri Strategis dan Teknologi Tinggi KEIN RI melakukan kunjungan kerja ke Labkurtannas Lemhannas RI, Senin (14/5) dalam rangka kunjungankerja terkait rencana penulisan policy memo dan policy paper KEIN kepada Presiden RI. Kunjungan kerja Tim Pokja tersebut, dipimpin oleh Ketua Tim Pokja ISTT KEIN RI, Andri B.S. Sudibyo, MM, dan diadakan di ruang rapat Labkurtannas Gd. Astagatra Lt. 8 Lemhannas RI.



### Agus Widjojo Terima Kedatangan Forum Kraton Nusantara

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menerima kunjungan Ketua Umum Forum Silaturahmi Kraton Nusantara (FSKN) di Ruang Tamu Gubernur, Gedung Trigatra Lemhannas RI, Selasa (22/5) pagi. FSKN merupakan sebuah wadah berkumpulnya para Raja dan Sultan serta keturunannya dari seluruh Kraton dan Kerajaan yang ada di Indonesia. Dalam kunjungannya, FSKN menyampaikan harapannya agar Lemhannas RI melalui tugas pokok dan fungsinya mampu menghadirkan kembali nilai-nilai luhur kekhasan Kraton sebagai bagian dari ukuran ketahanan nasional bidang sosial-budaya, baik bagi masyarakat maupun kader pimpinan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Lemhannas RI.



### NDC Nigeria Lakukan Kunjungan Studi ke Lemhannas RI

Peserta kursus National Defence College Nigeria melakukan kunjungan ke Lemhannas RI, Kamis (24/5), sebagai bagian dari “Geostrategic World Study Tour to Indonesia”. Sebanyak 25 peserta rombongan belajar tentang kebijakan pertahanan dan kontra terorisme di Indonesia. Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Laksda TNI Dedy Yulianto mewakili Gubernur Lemhannas RI menerima delegasi NDC Nigeria tersebut di Ruang Tamu Gubernur, Gd. Trigatra. Setelah melakukan ramah tamah, rombongan delegasi NDC Nigeria melakukan diskusi interaktif di Ruang Airlangga, Gd. Astagatra Lt.III.



## Lawatan Dubes Australia ke Lemhannas RI

Dubes Australia untuk Indonesia Gary Francis Quinlan AO yang baru dilantik, menggantikan Dubes Paul Grigson, melakukan lawatan ke Lemhannas RI untuk pertama kalinya setelah menjabat. Diterima langsung oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo di Ruang Tamu Gubernur, Gd. Trigatra, Kamis (24/5), kedua belah pihak membicarakan hal-hal strategis tentang peningkatan kerja sama dan masalah keamanan kawasan yang sedang hangat kini. Australia adalah salah satu negara sahabat yang selalu mengirimkan perwiranya untuk mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) di Lemhannas RI. Lemhannas RI juga telah menjalin kerja sama strategis dengan Australian Defence College (ADC), terutama dengan Center for Defense and Strategic Studies (CDSS) beberapa tahun belakangan ini.



## ASDEKSI Lakukan Audiensi dengan Gubernur Lemhannas RI

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menerima kedatangan dari Asosiasi Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (ASDEKSI), di Ruang Tamu Gubernur Gd. Trigatra Lemhannas RI, (25/5) siang. Kunjungan ASDEKSI dalam rangka menjalin kerja sama terkait pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagai Sekretaris Dewan, tentunya anggota ASDEKSI memiliki tanggung jawab besar dalam hal mengelola keuangan daerah, serta memberikan pelayanan yang prima dan menjadi jembatan penghubung antar lembaga eksekutif (Pemda) dan legislatif (DPRD).



## Gubernur Beri Arahan Mengenai Taskap

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo memberikan pengarahan terkait Kertas Karya Perseorangan (Taskap) kepada para Tajar, Taji dan Taprof Lemhannas RI di ruang Pancasila gd. Trigatra Lemhannas RI, Rabu (30/5). Dalam pertemuan tersebut Agus Widjojo ingin melihat perkembangan sejauh mana proses pendampingan selama bimbingan taskap oleh para tutor, karena Ia mengaku menerima beberapa keluhan dari para peserta PPRA yang menemui beberapa kendala selama melakukan bimbingan taskap dengan para tutor.



Redaksi Swantara Mengucapkan

# Dirgahayu



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

NATIONAL RESILIENCE INSTITUTE OF  
REPUBLIC OF INDONESIA

